2024

LKJIP

Sekretariat Daerah
Kabupaten Jombang
Tahun 2024

setdakab@jombangkab.go.id
@setda_jombangkab
(0321) 866025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu upaya perbaikan kinerja organisasi yang terus terus dilakukan untuk meningkatkan pertanggungjawaban pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk evaluasi yang diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta tetap pertahankan dalam mencapaikan kebijakan lebih tepat, hal ini juga merupakan pemenuhan pemerintahan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menerapkan Good and Clean Government.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 menyajikan hasil pencapaian kinerja pertanggungjawaban pemerintahan dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto. Hal ini sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi keberhasilan penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto. Sekian itu, semoga dan manfaat tersebut sebagai dan kami pergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja serta pertanggungjawaban pemerintahan di masa yang akan datang.

Jeneponto, 28 Februari 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Jeneponto

SETDA

[illegible]
Pembina Utama Madya
NIP. 197207131993031010

DAFTAR ISI

COVER 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 5
BAB I 7
PENDAHULUAN 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Maksud dan Tujuan 9
1.3 Dasar Hukum 9
1.4 Profil Sekretariat Daerah 8
1.5 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 8
1.6 Permasalahan dan Isu Strategis 9
1.7 Sumber Daya Manusia 10
BAB II 14
PERENCANAAN KINERJA 15
2.1 Pernyataan Strategis 16
2.2 Visi 16
2.3 Misi 16
2.4 Tujuan 16
2.5 Sasaran 17
2.6 Program dan Kegiatan 17
2.7 Strategi dan Kebijakan 17
2.8 Perjanjian Kinerja 18
2.9 Indikator Kinerja Utama (IKU) 23
2.10 Indikator Kinerja Individu (IKI) 24
2.10.1 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat 24
2.10.2 Program Pembangunan dan Pemerintahan 26
2.10.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota 28
BAB III 32
AKUNTABILITAS KINERJA 33
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 33
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan 33
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir 43
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah 51
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi 59
3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja 62
3.2 Realisasi Anggaran 64
3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran 69
3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 69
3.3 Kendala atau Permasalahan Indikator Kinerja 70
3.4 Upaya Perbaikan Kinerja 70
3.5 Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP oleh APIP Tahun 2024 70
BAB IV 81
PENUTUP 81

4.1 Kesimpulan 81
4.2 Rekomendasi 81
DAFTAR LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III Sekretariat Daerah 4
Tabel 1.2 Formasi Pegawai Berdasarkan Eselon, Jenis Jabatan, dan Golongan per Desember 2024 8
Tabel 1.3 Formasi Pegawai berdasarkan Pendidikan per desember 2024 9
Tabel 2.1 Tugasan, Bisnisnya, Strategi dan Arah Kebijakan 12
Tabel 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun Berjalan 27
Tabel 3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir 30
Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah 44
Tabel 3.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/pusat 50
Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran 56
Tabel 3.6 Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran 57
Tabel 3.7 Formasi Sekretariat Pegawai (ASN dan Non ASN) Sekretariat Daerah Tahun 2024 58
Tabel 3.8 Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia 59
Tabel 3.9 Data Barang dan Persediaan Sekretariat Daerah Tahun 2024 60
Tabel 3.10 Tingkat efisiensi penggunaan barang dan persediaan 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu laporan kinerja instansi yang dipersiapkan oleh instansi pemerintahan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan setiap misi organisasi. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdapat beberapa komponen seperti perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pengumpulan dan pengolahan data laporan kinerja. Laporan ini menghasilkan informasi dari pelaksanaan organisasi yang dapat dilihat melalui output yang dihasilkan yang berupa hasil capaian dari pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran strategis yang membandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan pemenuhan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan melakukan evaluasi kinerja dengan melakukan identifikasi output dan outcome suatu instansi.

Setiap Perangkat Daerah atau Organisasi diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja yang sesuai dengan pengukuran tingkatan yang telah ditetapkannya. Laporan ini disusun dengan sistematika yang memuat informasi informasi tentang capaian kinerja organisasi yang menyoroti perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir dan realisasi kinerja level nasional atau provinsi. Selain itu, Laporan ini juga memuat tentang capaian kinerja, informasi alokasi atau penggunaan sumber daya atau keberhasilan kinerja, serta informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan dan permasalah yang sering dihadapi dalam mewujudkan capaian kinerja. Hasil penyusunan laporan ini merupakan bentuk pemenuhan tujuan dan sasaran organisasi serta realisasi atas capaian kinerja utama. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat mewujudkan kinerja sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mampu dalam mengatasi kendala yang muncul dari permasalahan yang berhubungan dengan indikator kinerja utama organisasi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Memberi informasi mengenai target tentang Perjanjian Kinerja.
2. Memberikan gambaran tentang Kabupaten Daerah Kabupaten Jombang yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif.
3. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan di Kabupaten Daerah Kabupaten Jombang dalam pencapaian target sasaran pada bulan akhir tahun anggaran 2024 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Memberikan arah dan patokan bagi seluruh aparatur di lingkup Kabupaten Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
5. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam pelaksanaan pencapaian kegiatan Kabupaten Daerah Kabupaten Jombang.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum atau landasan normatif penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

12.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

14.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2/D);

15.Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16.Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 41/E, Tambahan Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 41/E);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Pegawai Negeri;

19.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

20.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja;

21.Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

23.Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

24.Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

1.4 Profil Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyusunnya fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 121 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, yang terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
   1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
      a) Kelompok Jabatan Fungsional
   2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
      a) Kelompok Jabatan Fungsional
   3. Bagian Hukum, membawahi:
      a) Kelompok Jabatan Fungsional
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
   1. Bagian Perekonomian, membawahi:
      a) Kelompok Jabatan Fungsional
   2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
      a) Kelompok Jabatan Fungsional
   3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
      a) Kelompok Jabatan Fungsional
d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
   1. Bagian Umum, membawahi:
      a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Rumah Dinas dan Kepegawaian;
      b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
      c) Sub Bagian Rumah Tangga.
   2. Bagian Organisasi, membawahi:
      a) Kelompok Jabatan Fungsional
   3. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:

a) Sub Bagian Perencanaan.

b) Sub Bagian Keuangan dan Pengurusan.

4. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan, membawahi:

a) Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, dan masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten, Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

1.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Kedudukan, tugas dan fungsi yang dikelemkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati Jombang Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, dijadikan pertimbangan kebijakan penyusunan permasalahan sebagai berikut:

1. Penerapan Kebijakan Satang Tata Pemerintahan masih belum maksimal.
2. Pengelolaan Perbitan urusan pemerintah daerah dan lembaga lainnya masih belum maksimal.
3. Belum optimalnya pembinaan Perangkat Daerah terkait koordinasi dan sinkronisasi Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Keterbatasan SDMD terhadap PAD masih rendah.
5. Rapat Pemimpin Kemenan, Polya Pemikiran dan Rapat Pengatasan konsep masih belum Berdiri Kompetensi.
6. Pengadaan sarana dan prasarana belum terkoordinasi maksimal berdasarkan barang
7. Kualitas Pelayanan Publik yang prima belum maksimal.
8. Implementasi Akuntabilitas Kinerja BKDD belum optimal.

Dampingi permasalahan utama (Strategis Issue) sebagaimana tersebut diatas, masih ada permasalahan pembangunan yang dihadapi dikarenakan kualitas penyelenggaraan pemerintah masih jauh pemerintah dan dalam pemerintah sebagai akan berdampak pada pembangunan daerah. Secara umum isu dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas atas pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak diimbangi dengan tersedianya SDM untuk mengoperasikan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Dinamika pemerintah organisasi dan ketersediaannya pemangkat daerah.

6. Hambatan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengusulkan kenaikan.
7. Hambatan kemampuan aparatur dalam mengelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam hal mengatasi permasalahan pemerintahan yang terjadi serta tuntutan strategi yang mereka, tentunya dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan pengawasan dalamnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana belum berjalan dengan baik sebagai upaya untuk mengatasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional dengan pengelolaan keuangan yang terukur, efisien serta memaksimalkan monitoring, pengendalian serta evaluasi kinerja di setiap organisasi.

1.7 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi. Dan mempunyai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan bertanya cang, maka diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai sistem kinerjanya mempun kualitas.

Tabel 1. 1 Pejabat Administrasi Eselon II dan III Sekretariat Daerah per Desember 2024

No	Nama	Jabatan
1.	ADHI PURNOMO, S.H., M.Si. NIP. 19720710 199403 1 003	Sekretaris Daerah
2.	SUDIRO SETIONO, S.Sos., M.Si. NIP. 19750201 200112 1 002	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan
3.	Drs. MUHAMMAD SALEH, M.Si. NIP. 19670807 199403 1 009	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Politik
4.	SRI SUSILUTI, S.H., M.Si. NIP. 19730113 199703 2 003	Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan
5.	Drs. PURNANTO, M.SP. NIP. 19661206 198903 1 002	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
6.	Drs. WIDNYO HARDODO, M.Si NIP. 19641211 199412 1 002	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7.	SYAIFUL ANWAR, ST., ME NIP. 19750519 200501 1 013	Asisten Administrasi Umum
8.	YUDHA ARMARA, S.STP., MM. NIP. 19800505 199810 1 001	Kepala Biro Tata Pemerintahan
9.	Drs. SUPRIADI NIP. 19690326 199403 1 007	Pth. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

10.	YAUMARNITA, M.Si NIP. 196[illegible] 2[illegible] 2 009	Kepala Bagian Hukum
11.	AMNATUR ROSIYAH, S.E., M.M. NIP. 196[illegible]17 199[illegible] 2 002	Kepala Bagian Perekonomian
12.	SUPRADIGDO, ST., M.Si. NIP. 196[illegible]04 2011[illegible] 1 002	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
13.	JOKO MUNGONO, ST., M.Si. NIP. 196[illegible]09 199[illegible] 1 001	Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa
14.	MOCHAMAD HABAN, S.Sos., M.Si NIP. 196[illegible]203 199[illegible] 1 002	Kepala Bagian Umum
15.	SUKIANTO, S.Sos NIP. 197[illegible]414 199[illegible] 1 001	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
16.	ADI PRAMUTO, S.T., M.Si. NIP. 197[illegible]14 199[illegible] 1 002	Kepala Bagian Organisasi
17.	ENI SUMINDRIYI, SE. NIP. 197[illegible]006 2011[illegible] 2 002	Pth. Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, selama kurun waktu tertentu, berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dikoordinasikan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Pada dasarnya, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, namun pada tahun 2024, menggunakan rencana strategis yang disusun berdasarkan masa transisi bupati jombang, sehingga ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang pada masa transisi ditetapkan untuk 2 Tahun pada tahun 2024-2026. Pada penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 revisi dan perubahan P-APBD 2024, berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 yang telah dimodifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.5-2406 Tahun 2024.

2.2 Visi

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah mendukung dan mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 yaitu "**Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025**"

2.3 Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah dibangun, dipertukan adanya Misi untuk terwujudnya Sistem Pemerintahan Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025. Misi Sekretariat Daerah 2024-2026 yaitu :

1. Mengembangkan tata kepemerintahan yang baik
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian dan produk unggulan daerah
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur

2.4 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan yang perlu diwujudkan untuk menjawab isu, mendukungkan misi, mencapai visi dan mencapai cita strategis yang ditetapkan. Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Kemitraan dan Kelembagaan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar untuk Mewujudkan SDM yang Unggul serta Pengelolaan Kawasan Kumuh

3. Mempertimbangkan Kesesuaian Berdasarkan untuk Mendukung Pemenuhan Investasi Sarana Barang dan Prasarana Unggulan Daerah.

2.5 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang dikonkrit dari suatu tujuan yang dibuat berdasar secara terukur spesifik, realistis dengan, rasional untuk dapat dikomunikasi dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Berdasarkan Sasaran Strategis Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang terdiri dari 10 (sepuluh) bagian yaitu: Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat; Bagian Hukum yang menyajikan tentang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/ Jasa yang menyajikan tentang Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Organisasi serta Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berada pada tentang kendali Asisten Administrasi Umum.

Berdasarkan pertimbangan tentang kendali tersebut dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA sampai dengan tahun 2023 maka disusunlah sasaran strategis dan Sekretariat Daerah untuk RPD 2024-2026 pada tahun 2024 adalah :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Para Institusi layanan publik Pemerintah Daerah, dengan indikator :
   - Indeks Kualitas Kelapisan
   - Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa
   - Indeks Kelembagaan
   - IKPP Kabupaten
   - Indeks SPB
2. Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Para Institusi layanan publik Sekretariat Daerah, dengan indikator sasaran :
   - IKPP Setda
   - Nilai SAKIP Setda

2.6 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan spesifik, terkaitan dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana memiliki 3 program, 20 kegiatan dan 44 sub kegiatan.

2.7 Strategi dan Kebijakan

Strategi dapat diartikan suatu pendekatan yang konseptual, analitis, rasional, dan komprehensif tentang langkah yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Perumusan strategi merupakan penyusunan yang menjelaskan

Implementasi sasaran dibuat dengan sebanyaknya dipenjabat dengan menggunakan kategorisasi.

Kebijakan adalah tindakan atau tindakan yang dibuat untuk mencapai tujuan. Secara umum yang dimaksud dengan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengembangkan rencana atau strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Proses penyusunan pembangunan di Kabupaten Daerah Kabupaten Jombang adalah melaksanakan/mengkomunikasi kepentingan pengarusutamaan responsif gender.

Dengan mempertimbangkan sasaran, strategi, program, dan kegiatan diatas, dirumuskan rancangan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan aksesibilitas dan kinerja Birokrasi Pelayanan Daerah	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Pelayanan publik Pemerintah Daerah	Menyelenggarakan dan Mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima	Penataan Kelembagaan dan Pelayanan Publik yang berkualitas untuk menciptakan pembiakan sosial masyarakat Jombang yang berkualitas dan berdaya saing
	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Pelayanan publik Pemerintah Daerah		

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja adalah berbagai dokumen yang berisikan pernyataan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 800/621/418.01/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADOE PURNOMO, SH., M. Si
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUGIAT, S.Sos., M.Pd.T.
Jabatan : Pj. BUPATI JOMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 15 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah
Ditandatangani secara elektronik

ADOE PURNOMO, SH., M.Si.
NIP. 197207101993021001

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI JOMBANG
Ditandatangani secara elektronik

SUGIAT, S.Sos., M.Pd.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi serta kualitas layanan publik Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	62	Rp 24.302.729.000
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	73.2	
		Indeks Kelembagaan	79.28	
		Nilai SAKIP Kabupaten	72.14	
		Indeks SPBE	3.194	
		IKPP Kabupaten	7.5	
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi serta kualitas layanan publik Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Setda	82.54	
		IKPP Setda	8.2	

Jombang, 15 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik

AGUS PRIYOMO, SH., M.Si.

NIP. 197207121999031010

PIHAK KEDUA

Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik

SUNAT, S.Sos., M.Pd.T.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 000.8.6.2/488/418.01/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADUS PURNOMO, SH., M. Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM.**
Jabatan : **P.J. BUPATI JOMBANG**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 19 September 2024
PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah
Ditandatangani secara elektronik

ADUS PURNOMO, SH., M.Si.
NIP. 197207121994031010

PIHAK KEDUA
P. BUPATI JOMBANG
Ditandatangani secara elektronik

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi serta kualitas layanan publik Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kerjasama	82	Rp 94.321.232.441
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	72,9	
		Indeks Akuntabilitas	78,28	
		Nilai SAKIP Kabupaten	72,14	
		Indeks BPKE	3,164	
		IKPP Kabupaten	7,8	
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi serta kualitas layanan publik Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Setda	83,04	
		IKPP Setda	8,2	

Jembrana, 13 September 2024
PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah
Ditandatangani secara elektronik

AGUS PERMONO, SH., M.H.
NIP. 197307101993031010

PIHAK KEDUA
Ny. SUWATI JEMBRANA
Ditandatangani secara elektronik

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NO	Sasaran Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi serta kualitas layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai IKK Akhir Tahun	SE Nomor 22/K.3/MSM.02.2/2021 (LAN)
		Indeks Pengelolaan Barang Jasa	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ	SK LKPP No 6 Tahun 2021
		Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai Evaluasi SAKIP Tahunan	LHE Implementasi SAKIP Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
		Indeks Kelembagaan	Nilai Indeks Kelembagaan Tahunan	SK Bupati Jembrana tentang Indeks Kelembagaan
		Indeks SPBE	Nilai SPBE Tahunan	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
		IKPP Kabupaten	(1,25 X Nilai IKM Pemda) + Nilai IPP Pemerintah Daerah	SK BUPATI tentang IKPP Tahunan

NO	Sasaran Utama	Indikator Sasaran Utama	Formulasi	Sumber Data
		Persentase Capaian komponen strategi Pelaksanaan RB Pemda	Capaian Nilai komponen strategi Pelaksanaan RB ------- x 100% Persentase Nilai Pembobot	LHE Implementasi RB Mentari Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja birokrasi serta kualitas layanan publik Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah oleh Tim APIP
		IP ASN Sekretariat Daerah	Nilai IP ASN tahun n-1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		IKPP Sekretariat Daerah	(1.25 x Nilai IKM Sekretariat Daerah) + Nilai PP Sekretariat Daerah	SK BUPATI tentang IKPP Tahun n

2.10 Indikator Kinerja Inderalin (IKI)

2.10.1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No.	Sasaran	Indikator Sasaran Utama	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksanaya pemantauan kebijakan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di urusan koordinasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan rakyat	Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan	Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan yang disusunkan	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Pemerintahan yang dilaksanakan tahun n	Bagian Tata Pemerintahan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran Utama	Formulasi	Sumber Data
		Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dirampungkan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diselesaikan tahun n	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Persentase produk hukum yang tertata tertib hukum	Jumlah produk hukum yang tertata tertib hukum ----------x 100% Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Bagian Hukum
2.	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang tertang tertib Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi Anggaran yang tertang tertib Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Realisasi anggaran yang tertang tertib Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ----------x 100% Pagu anggaran yang tertang tertib Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Realisasi SKPD
		Persentase penyampaian laporan barang milik daerah secara akurat yang tertang tertib administrasi pemerintahan dan	Jumlah laporan barang milik daerah yang disampaikan ---------- X 100% Jumlah laporan barang milik daerah secara akurat	Bagian tata pemerintahan, bagian kesejahteraan rakyat, bagian hukum

No.	Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
		kesejahteraan rakyat		
3	Terwujudnya operasi sipil Negara yang profesional dan bersih serta pada tertib kondisi sosial pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Rata-rata IP operasi sipil negara pada tertib kondisi sosial pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Rata-rata IP operasi sipil negara pada tertib kondisi sosial pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tahun n-1	Biro kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
4	Meningkatnya layanan penggunaan layanan pada tertib kondisi sosial pemerintahan dan kesra	Indeks layanan layanan bantuan hukum dan penyusunan peraturan undangan	LPP akhir tahun	Bagian hukum

3.10.2 Program Pendaftaran dan Pembangunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksanaya pelaksanaan kebijakan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di tertib kondisi sosial pemerintahan dan pembangunan	Jumlah kebijakan tertib administrasi	Jumlah kebijakan tertib Pemerintahan yang ditetapkan	Bagian pemerintahan
		Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan tertib Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kebijakan tertib Pemerintahan yang dilaksanakan tahun n	Bagian pemerintahan

No.	Sasaran Utama	Indikator Sasaran Utama	Formulasi	Sumber Data
		Jumlah pengadaan laporan program pembangunan	Jumlah pengadaan laporan program pembangunan yang dibuatkan	Bagian administrasi pembangunan
		Persentase rumusan hasil kebijakan pengumuman dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengelolaan barang/jasa	Jumlah rumusan hasil kebijakan ---------- x 100% Rumusan kebijakan yang ditetapkan	Bagian pengelolaan barang/jasa
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang/jasa	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pemanfaatan sistem pengadaan	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan sistem pengadaan ---------- x 100% Jumlah perangkat daerah	Bagian pengelolaan barang/jasa
3.	Terlaksananya pengelolaan barang/jasa dan barang milik daerah sebagai aset daerah pada tertib hasil sistem pembinaan dan pembangunan	Persentase rekomendasi anggaran pada tertib hasil sistem pembinaan dan pembangunan	Realisasi anggaran pada tertib hasil sistem pembinaan dan pembangunan ----- x100% Pagu anggaran pada tertib hasil sistem pembinaan dan pembangunan	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
		Persentase penyampaian laporan barang milik daerah secara akurat pada tertib barang barang milik daerah urusan pemerintahan dan pembangunan	Jumlah laporan barang milik daerah yang disampaikan ------ x100% Jumlah laporan barang milik daerah urusan urusan	Bagian pemerintahan, bagian administrasi pembangunan, bagian pengelola barang/jasa
4	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan kompetensi pada tertib barang barang milik daerah urusan pemerintahan dan pembangunan	Nilai rata IP aparatur sipil negara pada tertib barang pada barang milik daerah urusan pemerintahan dan pembangunan	Nilai rata IP aparatur sipil negara pada tertib barang pada barang milik daerah urusan pemerintahan dan pembangunan tahun n-1	Bagian kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
2.	Meningkatkan kepuasan pengguna layanan pada tertib barang barang milik daerah urusan pemerintahan dan pembangunan	Persentase pengaduan layanan pengelola barang/jasa (survei indeks kepuasan masyarakat)	Nilai IKM tahun n - Nilai survei kepuasan masyarakat tahun n-1 ------ x100% Nilai IKM tahun n-1	Bagian pengelola barang/jasa

2.10.2 Program Pengelola Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksanaya penyusunan kebijakan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di tertib	Jumlah kebijakan, monitoring dan evaluasi barang pemerintahan dan pembangunan	Jumlah kebijakan yang disusunkan	Bagian pemerintahan dan kesejahteraan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
	Terwujud Aparatur Administrasi Umum	Jumlah kebijakan, monitoring dan evaluasi bidang kemaritimen dan statistik, pertanian, perpustakaan, kearsipan, perpustakaan, urusan penunjang bidang kepegawaian, urusan penunjang pendidikan dan pelatihan, dan kesbangpolinmas	Jumlah kebijakan yang ditetapkan	Bagian organisasi
		Persentase rata-rata peningkatan nilai kelembagaan pengelola statistik	Nilai kelembagaan tahun n – nilai kelembagaan tahun n-1 ----- X 100% Nilai kelembagaan tahun n-1	BPS SESUDA tentang nilai kelembagaan
2	Meningkatkan implementasi SAKIP RB di pengelola statistik	Persentase rata-rata peningkatan capaian nilai SAKIP RB pengelola statistik	(% pengelola SAKIP Pemda) – (% pengelola RB Pemda) ----------2	LPE Implementasi SAKIP RB tahun n
3	Meningkatkan implementasi SPBE di Kabupaten Jombang	Persentase rata-rata peningkatan nilai indeksi SPBE	Nilai SPBE tha n – nilai SPBE tha n-1 -------- x100% Nilai SPBE tha n-1	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kemenpan RB
4	Meningkatkan kepatuhan pengguna layanan lingkup Pemda	Persentase rata-rata peningkatan IKPP Unit layanan	Nilai IKPP tahun n – nilai IKPP tahun n-1 ----- x 100% Nilai IKPP tahun n-1	BK SIPATI tentang IKPP tahun n

No.	Sasaran Utama	Indikator Sasaran Utama	Formulasi	Sumber Data
5	Terlaksananya pembangunan RB secara optimal	Persentase realisasi atau capaian atau pembangunan RB Pemda	Capaian realisasi rencana aksi RB Pemda	Portal RB
6	Meningkatnya implementasi SAKIP RB di Pemda	Persentase rata-rata peningkatan capaian nilai SAKIP RB kabupaten/kota	(% peningkatan SAKIP tahun) + (% peningkatan RB tahun) ----:2	LKE implementasi SAKIP & RB BETTA oleh tim APIP
7	Meningkatkan capaian kinerja aparatur di kabupaten/kota yang optimal	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Rata-rata capaian IKU ASN tingkat kabupaten/kota	BA capaian IKU Regres
8	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMD kabupaten/kota yang optimal	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan tahun n	BPKAD
		Indeks pengelolaan aset daerah	(80% x persentase kesesuaian pernyataan dengan realisasi pengisian BMD) + (20% x persentase kesesuaian waktu penyampaian laporan Kuisioner BMD paling lambat 10 hari kalender berikutnya) + (25% x persentase capaian entry data pengelolaan BMD dalam sistem informasi BMD 31 32 Desember)	Kegiatan pemeriksaan dan bimbingan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Pencapaian	Sumber Data
9	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas pada urusan kesatuan administrasi umum	Rasionalisasi SP aparatur sipil negara pada urusan kesatuan administrasi umum	Rasionalisasi SP aparatur sipil negara pada urusan kesatuan administrasi umum tahun n-1	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
10	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada urusan kesatuan administrasi umum	Persentase pelayanan kepemerintahan dan komunikasi kepala daerah/wakil kepala daerah	Kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang di protokol ----- x100% Jadwal kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jadwal kegiatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menyajikan pembahasan dan pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja sekretariat dan cara penilaian ketercapaian dan keberhasilan kegiatan berdasarkan indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).

Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah melakukan upaya untuk mewujudkan akuntabilitas kinerjanya berdasarkan sistem penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang dibuat sesuai ketentuan yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran pencapaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 yang telah ditandatangani dengan Keputusan Bupati Dalam Bagian Nomor 800.1.16.2-3256 Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Reviu dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2004 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dan indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja yang ditentukan, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan skala pengukuran ordinal (berjenjang) pada Permenpan Regnas Nomor 47 Tahun 2022, sebagai tabel berikut:

KLASIFIKASI PENILAIAN DAN KATEGORI PENILAIAN KEBERHASILAN/KEGAGALAN

PENCAPAIAN SASARAN STRATEGI DAN CAPAIAN INDIKATOR

NO	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	>110% - 120%	Istimewa/Sangat Berhasil
2.	>90% - 110%	Baik/Berhasil
3.	>70% - 80%	Butuh Perhatian/Cukup
4.	>50% - 70%	Kurang
5.	0%-50%	Sangat Kurang

5.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi merupakan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi yang disajikan dalam bentuk persentase berdasarkan perbandingan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapaikan. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah dapat dijabarkan berdasarkan sasaran strategis yang membandingkan antara target dan realisasi tahun berjalan, antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan dua tahun terakhir, antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah dan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.

5.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan

Berikut adalah hasil capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran strategis yang membandingkan target dengan realisasi tahun berjalan:

Tabel 5.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun Berjalan

NO.	Sasaran Strategis (Sasaran Hasil Kerja)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan layanan publik Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Pelayanan	Indeks	82	73,22	89,27%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	73,8	74,22	107,14%
		Indeks Akuntabilitas	Indeks	75,22	75,22	100%
		Nilai SKDP Kabupaten	Nilai	75,14	72,35	96,28%

NO.	Sasaran Strategis (Sasaran Hasil Kerja)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Indeks BPRS	Indeks	5,144	5,91	120%
		IKPP Kabupaten	Indeks	7,9	8,48	106,58%
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Satu kesatuan layanan publik Pelayanan Domisili	Nilai BAKP Satda	Nilai	35,04	32,32	98,77%
		IKPP Satda	Indeks	8,9	8,43	101,17%
Nilai rata Capaian						102,50%

Berdasarkan perhitungan kinerja diatas, diperoleh nilai rata capaian kinerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Bakesbangpol tahun 2024 adalah sebesar 102,50% termasuk kategori Sangat Berhasil, sedangkan capaian kinerja berdasarkan dokumen Rencana Kinerja Pegawai (RKP) terdapat 2 (dua) indikator tambahan yang tidak muncul dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu indikator "Persentase Capaian komponen strategi Pelaksanaan RB Pemda" dan "P AKIP Satda", sehingga capaian kinerja berdasarkan dokumen RKP tahun 2024 adalah sebesar 109,83% sebagaimana tertuang dalam dokumen pengukuran kinerja tahun 2024. Berikut adalah penjelasan tiap Indikator Kinerja Utama antara lain:

1. **Indeks Reaktivasi Kebijakan**

Indeks Reaktivasi Kebijakan (IKK) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur capaian urusan kebijakan publik atau organisasi dirancang dan dilaksanakan secara efektif, efisien, cepat, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pencapaian IKK dikomunikasikan dua tahun sekali. Dilakukan evaluasi pencapaian tahun 2023 untuk nilai 2022 dan 2024, namun belum ada reaktivasi, sehingga LAN RI menyarankan kesampaian kepada Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan evaluasi ulang di tahun 2024, dengan hasil nilai evaluasi yang diperoleh adalah sebesar 16,22 dalam kategori Cukup. Hasil tersebut belum mencerminkan dikomunikasikan hasilnya urusan kebijakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dimasukkan dalam sistem LAP untuk dilakukan sampling pencapaian IKK oleh LAN RI. Target Indeks Reaktivasi Kebijakan yang ditetapkan pada perjanjian Kinerja adalah 40 (Kategori Baik), namun realisasinya sebesar 16,22 (kategori

sebagai, sehingga capaian kinerjanya sebesar 59,27% (kategori baik/berhasil). Akan dilakukan pertemuan dipendapat IKK tahun 2024 dan tahun 2025

2. **Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa**

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang/Jasa adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola dalam proses pengadaan barang dan jasa di suatu organisasi atau instansi. Indeks ini umumnya mengacu pada berbagai indikator yang mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Indeks ini mencakup beberapa tingkat pemenuhan sistem pengadaan, keamanan kualitasnya dan kompetensi SDM PBJ, dan keamanan tingkat kematangan SKPBJ. Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang/Jasa dikomunikasi setiap tahun. target yang ditetapkan pada perjanjian Kinerja adalah 73,9 dan terealisasikan sebesar 79,02, sehingga capaian kinerjanya sebesar 107,21% (kategori baik/berhasil).

3. **Indeks Kelembagaan**

Indeks Kelembagaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kapasitas, efektivitas, dan kualitas tata kelola suatu lembaga dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Indeks ini mencerminkan sejauh mana suatu lembaga memiliki struktur organisasi yang baik, sumber daya yang memadai, regulasi yang jelas, serta mekanisme tata kelola yang efektif untuk mencapai tujuan pemerintahan. Pencapaian Indeks Kelembagaan dikomunikasi 2 (dua) tahun sekali, realisasi 79,28 merupakan nilai yang dipersiapkan dari evaluasi tahun 2023, sehingga nilai tersebut menjadi nilai tahun 2023 s.d 2025. Target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) adalah 79,28 berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% (kategori baik/berhasil).

4. **Nilai SAKIP Kabupaten**

Nilai SAKIP Kabupaten akan dikomunikasi oleh Kementerian PAN-RB setahun sekali. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) adalah 75,14 dan terealisasi 75,53 lebih baik dari target yang ditentukan, sehingga capaiannya lebih maksimal, yaitu sebesar 96,89 masuk dalam kategori baik/berhasil.

5. **Indeks SPBE**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah. Indeks ini menggunakan indikator untuk menilai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan pelayanan publik. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) adalah 3,124 dan terealisasi 3,91 melebihi target yang ditentukan, sehingga capaiannya mencapai lebih maksimal, yaitu sebesar 125% (kategori sangat berhasil).

6. IKPP Kabupaten

Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKPP) Kabupaten merupakan ukuran yang digunakan untuk mendata tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. Indeks ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta responsivitas birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada warga. Pada tahun IKPP dikalkulasikan setahun sekali, pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) adalah 7,30 dan terealisasi 8,42 melebihi target yang ditentukan, sehingga capaiannya melebihi 100%, yaitu sebesar 108,88% (kategori sangat baik).

7. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Penilaian (Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP Sekretariat Daerah dikalkulasikan setiap setahun sekali oleh Inspektorat (APIP) untuk mengevaluasi optimal Perangkat Daerah telah mengimplementasikan SAKIP. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) adalah 83,04 dan terealisasi 83,02 lebih rendah dari target yang ditentukan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,77% (kategori baik/berhasil).

8. IKPP Sekretariat Daerah

Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat Daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk mendata tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah. Indeks ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta responsivitas birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pendataan IKPP dikalkulasikan setahun sekali, pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) adalah 8,50 dan terealisasi 8,62 melebihi target yang ditentukan, sehingga capaiannya melebihi 100%, yaitu sebesar 101,43% (kategori baik/berhasil).

Dalam rka, adapun penyelarasan indikator tambahan yang dimasukkan dalam IKP Sekretariat Daerah dan diukur pada dokumen Pengukuran Kinerja antara lain:

1. Persentase Capaian Komponen Strategi Pelaksanaan RB Pemerintah Daerah

Persentase Capaian Komponen Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah (Pemda) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan strategi dalam agenda Reformasi Birokrasi (RB) secara dengan kebijakan nasional. Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi program dan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah, berdasarkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada IKP Sekretariat Daerah adalah 70%, dan hasil terealisasi 67,20% berdasarkan perhitungan dari beberapa komponen pada LHE RB Kabupaten yang diskoreksi BerPAN-RB tanggal 23 April 2025. Meskipun capaian kinerjanya sebesar 96,19%, hal ini dikarenakan terjadi karena terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yang hanya 42,20%.

2. IP ASN Setda

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Sekretariat Daerah (Setda) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Indeks ini mencerminkan kompetensi, kinerja, etika, dan disiplin ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Tujuan IP ASN dimanfaatkan dalam SKP Sekretariat Daerah adalah untuk meningkatkan IP ASN lingkup Sekretariat Daerah. Pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 75 dan terealisasi sebesar 87,32, sehingga capaian kinerjanya mencapai hasil maksimal yaitu 120% (kategori tercapai/sangat berhasil).

Satuan indikator tersebut tersebut belum dimasukkan dalam PK Perubahan tahun 2024 namun sebagai evaluasinya akan dimasukkan dalam PK tahun 2025.

Berikut adalah Capaian Kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan Program yang membandingkan target dengan realisasi tahun berjalan:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terkoordinasinya penyusunan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di ranting koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan	23 Dokumen	31 Dokumen	135%
		Jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Jumlah rekomendasi hasil monev pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Jumlah monev kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Persentase produk hukum yang sesuai bentuk hukum	100%	100,00%	100%
2.	terkoordinasinya pengelolaan keuangan dan BMD Sekretariat Daerah pada ranting bendahara Asisten Pemerintahan dan Kesra	Prosentase Pelaporan Laporan BMD sesuai ketentuan pada ranting bendahara Asisten Pemerintahan dan Kesra	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi Anggaran pada ranting bendahara Asisten Pemerintahan dan Kesra	88%	98,83%	112%

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Terwujudnya ASN yang profesional dan berkegiatan pada rentang lembaga Auditor Pemerintahan dan Kaur	IP ASN pada rentang lembaga Auditor Pemerintahan dan Kaur	71 Angka	87,87 Angka	123%
4.	Terwujudnya layanan penggunaan layanan pada rentang konsultasi dan rentang lembaga Auditor Pemerintahan dan Kaur	Indeks Layanan Layanan Konsultasi Hukum dan Penyelesaian Pelanggaran Undangan	91 Indeks	88,88 Indeks	97,53%
Rata-rata Capaian					109,26%

Rata-rata capaian kinerja Program Pemerintahan, Kaur, dan Hukum mencapai 109,26% dalam kategori Baik (Berhasil). Terdapat beberapa kinerja yang realisasinya diatas dan di bawah 100% antara lain:

- Pada indikator "Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan" terealisasi sebanyak 31. Realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya mencapai angka maksimal yaitu 120%. Hal ini dikarenakan terdapat realisasi lebih pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan
- Pada indikator "Persentase produk hukum yang sesuai bentuk hukum" terealisasi sebesar 100,26% lebih besar dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Hal ini dikarenakan karena adanya penyelesaian kasus kegiatan fasilitasi dan konsultasi hukum pada bagian hukum
- Pada indikator "Persentase Realisasi Anggaran pada rentang rentang lembaga Auditor Pemerintahan dan Kaur" terealisasi 96,63% lebih besar dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Hal ini karena terjadi penyelesaian penyerapan anggaran belanja pada bagian di rentang lembaga Auditor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Pada indikator "IP ASN pada rentang lembaga Auditor Pemerintahan dan Kaur" terealisasi sebesar 87,87 lebih besar dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya mencapai angka maksimal

pada 120%. Hal ini dimungkinkan adanya peningkatan kompetensi pada ASN di Bagian tertentu (contoh: Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam).

- Pada indikator "Indeks Kepuasan Layanan Kantor Urusan dan Perjuangan Perantauan/Diaspora" terealisasi 80,18% lebih rendah dari target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya hanya 87,24% tidak mencapai 100%. Hal ini dimungkinkan karena hasil survey indeks kepuasan masyarakat dalam maintenance.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Indikatif	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terkoordinasinya penyusunan kebijakan dan sinkronisasi kebijakan di tentang koordinasi Urusan Perekonomian dan Pembangunan.	Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Jumlah pengembangan kapasitasnya program pembangunan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100%
		Persentase penyusunan konsep kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengelolaan barang/jasa	70%	100%	120%
2.	Meningkatnya Excellent Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pemangkat Daerah yang melaksanakan pemanfaatan sistem pengadaan.	100%	100%	100%
	terkoordinasinya pengadaan barang/jasa dan SMK Sekretariat Daerah pada tentang bantuan Urusan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyampaian Laporan SMK secara secara pada tentang bantuan Urusan Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi Anggaran pada tentang bantuan	97%	88,13%	90,83%

No	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan			
	Terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas pada rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	IP ASN pada rentang pada kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	74 Angka	87,51 Angka	118,28%
	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang kendali dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (survey IKM)	1%	1%	100%
Rata-rata Capaian					**106,57%**

Rata-rata capaian kinerja Program Perekonomian, Sarana, dan Prasarana mencapai 106,57% dalam kategori Baik (Berhasil). Terdapat beberapa kinerja yang realisasinya diatas 100% antara lain:

- Pada indikator "Jumlah pengaduan kepuasan program pembangunan" terealisasi sebanyak 2 kelompok lebih besar dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya mencapai angka maksimal yaitu 150%. Hal ini dikarenakan terdapat penambahan rekomendasi kelompok pelaksanaan pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan.
- Pada indikator "Persentase perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa" terealisasi sebesar 100% lebih besar dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya mencapai 120%. Hal ini dikarenakan karena adanya peningkatan perumusan kebijakan pada pelaksanaan pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Pada indikator "Persentase Realisasi Anggaran pada rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan" terealisasi 88,10% lebih besar dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,90%. Hal ini karena terjadi peningkatan penyerapan anggaran belanja pada bagian di rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

- Pada indikator "IP ASN pada rentang pada bendahi Aceiten Pemkomnomian dan Pembangunan" tercatatnai rata-rata Nilai IP ASN sebesar 87,5 lebih besar dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya mencapai angka maksimal yaitu 110,00%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kompetensi pada ASN di Bagian rentang bendahi Aceiten Pemkomnomian dan Pembangunan.

a. **Program Pemenjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya penyusunan kebijakan dan rencana pelaksanaan kebijakan di rentang lemdinam Aceiten Administrasi Umum	Jumlah Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, Perpustakaan, Kearsipan, Perpustakaan, Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian, Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan, dan Kepegawaian	17 Dokumen	17 Dokumen	100%
2.	Meningkatnya implementasi SAKIP PD di Perangkat Daerah	Persentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP PD Perangkat Daerah	0,01%	2,12%	21,21%
3.	Meningkatnya pengelolaan Sri Jatur dan Pesan Organisasi di Perangkat Daerah	Persentase rata-rata peningkatan sukses internalisasi perangkat daerah	0,00%	N/A	N/A
4.	Meningkatnya implementasi SPBE di Kabupaten Jembrana	Persentase rata-rata peningkatan nilai indikator SPBE	1,71%	12,54%	120%
5.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan lingkup Pemda	Persentase rata-rata peningkatan IKPP Unit Layanan	1,16%	2,16%	120%
6.	Terlaksananya pembangunan RB secara optimal	Persentase realisasi atas Rencana Pembangunan RB Pemda	85%	150,15%	120%

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Realisasi	Capaian (%)
7.	Meningkatnya implementasi SAKIP RB di Satker	Persentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah	1,14%	0,042%	3,68%
8.	Meningkatnya capaian kinerja operator di Sekretariat Daerah	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Operator	100%	104,7%	104,70%
9.	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMD Sekretariat Daerah yang optimal	Indeks Pengelolaan Keuangan Satker	95 Angka	100 Angka	105,26%
		Indeks Pengelolaan Aset Satker	90 Angka	91 Angka	101,20%
10.	Terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas pada rentang kendali Asisten Administrasi Umum	37 ASN pada rentang kendali Asisten Administrasi Umum	37 Angka	37 ASN Angka	100,27%
11.	Meningkatnya layanan penggunaan layanan pada rentang kendali dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Persentase pelayanan keperluan dan kemudahan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					91,78%

Rata-rata capaian kinerja Program Pemerintahan, Reform, dan Hukum mencapai 91,78% dalam kategori Baik (Berhasil). Terdapat beberapa kinerja yang realisasinya diatas dan di bawah 100% antara lain:

- Pada indikator "Persentase Rata-rata Peningkatan Capaian Nilai SAKIP RB Pemerintah Daerah" terealisasi 0,10% lebih kecil dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 21,01% target rendah. Hal ini dikarenakan cara kinerja pelaksana metode evaluasi SAKIP pada Pemerintah Daerah sehingga peningkatannya tidak signifikan.
- Pada indikator "Persentase rata-rata peningkatan capaian nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah" terealisasi sebesar 3,042% lebih kecil dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 3,68% target rendah. Hal ini dikarenakan cara kinerja pelaksana pada nilai SAKIP Sekretariat Daerah, dan kesadaran Nilai RB yang kurang signifikan, sehingga rata-rata peningkatannya cukup kecil.

- Pada indikator "Persentase rata-rata pertumbuhan indeks kelembagaan pertagian daerah" telah tercapai realisasi [illegible] DOKUMENTASI PERELAJAN Indeks Kelembagan dikumandang 3 tahun sekali. Pembaca akan dilaksanakan kembali di tahun 2026 untuk mendapatkan nilai Indeks Kelembagan tahun 2023-2025.
- Pada indikator "Persentase rata-rata pertumbuhan nilai indikator SPBE", "Persentase rata-rata pertumbuhan IGTP Unit Layanan", "Persentase realisasi nilai Reviu a Pembangunan RD Pemda" terealisasi jauh lebih besar dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya mencapai maksimal yaitu 120%. Hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan yang cukup signifikan pada nilai indikator SPBE, IGTP, dan realisasi reviu pembangunan RD.
- Pada indikator "Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah" terealisasi 100 lebih besar dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya mencapai 105,26%. Hal ini terjadi karena pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah telah optimal.
- Pada indikator "Indeks Pengelolaan Aset Daerah" terealisasi 91 lebih besar dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,26%. Hal ini terjadi karena pengelolaan Aset di Sekretariat Daerah telah optimal.
- Pada indikator "Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Operator terealisasi 81% lebih besar dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya mencapai 104,70%. Hal ini terjadi karena terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun ke ke tahun sebelumnya.
- Pada indikator "IP ASN pada rentang kendali dominan Pelaksanaan dan Kasubag" terealisasi sebesar [illegible] Nilai IP ASN sebesar 87,85 lebih besar dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerjanya mencapai angka maksimal yaitu 120%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kompetensi pada ASN di Bagian rentang kendali Asisten Administrasi Umum.

6.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun lal dengan 2 (dua) tahun terakhir

Berikut adalah Capaian Kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran strategis yang membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan dua tahun sebelum:

Tabel 2. 3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 3 (tiga) tahun terakhir

NO.	Sasaran Strategis Pemenuhan Hasil Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi		
					2022	2023	2024
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Baru kualitas layanan publik Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	85	71,4	71,4	88,22
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	75,6	71,4	75,07	79,02
		Indeks Akuntabilitas	Indeks	79,28	71,4	79,28	79,28
		Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	72,14	72,14	72,75	72,35
		Indeks SPBE	Indeks	2,154	2,96	3,49	3,91
		IEPP Kabupaten	Indeks	7,9	7,219	7,83	8,46
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Baru kualitas layanan publik Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Desa	Nilai	83,04	82,08	82,10	82,02
		IEPP Desa	Indeks	3,2	3,201	3,47	3,63

Berdasarkan tabel perbandingan sasaran strategis antara realisasi tahun 2024 dengan 2 tahun terakhir dapat kita di jabarkan pada masing-masing indikator sasaran tahun:

1. Indeks Kualitas Kebijakan

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kualitas Kebijakan merupakan indikator kerja yang ditetapkan sebagai indikator kinerja sasaran Meningkatnya Daerah pada tahun 2024 dan pencapaiannya baru dilaksanakan pada tahun 2023 untuk nilai 2022 dan 2024, dan realisasi 88,22 termasuk cukup. Pencapaian IKK dilaksanakan dua tahun sekali, dikarenakan evaluasi pandemi tahun 2022 untuk nilai 2023 dan 2024, namun belum ada realisasi, sehingga LAP RI membuatkan instrumen kepada Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan evaluasi dengan di tahun 2024, dengan hasil nilai evaluasi yang diperoleh adalah sebesar 88,22 dalam kategori Cukup. Hasil tersebut belum maksimal dikarenakan belum semua kebijakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dimasukkan dalam sasaran LAP untuk dilakukan sampling pendapat IKK oleh LAP RI. Target Indeks Kualitas Kebijakan yang ditetapkan pada perjanjian Kinerja adalah 85 (Enteng Kuat), namun realisasinya

sebesar 92,22 (kategori sehat), sehingga capaian kinerjanya sebesar 89,27% (kategori baik/berhasil). Akan dikalkulasi perbedaan capaian IKK tahun 2023 dan tahun 2024.

2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2024, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) mengalami peningkatan mencapai 79,52 dari target yang ditetapkan sebesar 75,5 dan realisasi tahun 2023 sebesar 72,07. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar kualitas tata kelola pengadaan Barang/Jasa lingkup pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berasar tabel diatas, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) mengadung berbagai aspek dalam proses pengadaan termasuk : 1) Sumber Daya Manusia (SDM) - kualitas dan kompetensi SDM yang terlibat dalam pengadaan, 2) Kelembagaan - struktur dan tata kelola pengadaan di instansi pemerintahan, 3) Pemanfaatan Sistem Pengadaan - penggunaan sistem informasi pengadaan seperti SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) termasuk SIKAP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), e-tendering, e-purchasing, dan e-katalog. Dalam penilaian ITKP, indikator yang di nilai adalah Tingkat Kemampuan UKPBJ yang telah mentapatkan nilai penuh sejak tahun 2022. Indikator Kualitas dan Kompetensi SDM PBJ telah mengalami perbaikan karena di tahun 2024 personil yang di ungulkan untuk membantu dalam pengadaan dan uji kompetensi yang sudah baik di sekitarkan di tahun yang sama. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan mengalami nilai terendah penyumbang kesulitan nilai ITKP sebesar 0,22 hal ini di dukung karena belum dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala serta koordinasi bersama seluruh Perangkat Daerah di kabupaten Jombang untuk memanfaatkan Sistem Pengadaan secara menyeluruh.

3. Indeks Kelembagaan

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kelembagaan merupakan indikator kunci yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama Kabupaten Daerah pada tahun 2024. Pencapaian Indeks Kelembagaan dikalkulasikan 3 (tiga) tahun terakir, realisasi 79,20 menunjukkan nilai yang diperoleh dari evaluasi tahun 2022, sehingga nilai tersebut masuk nilai tahun 2023 s.d 2024. Target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) adalah 79,20 berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% (kategori baik/berhasil).

4. Nilai SAKIP Kabupaten

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi nilai indikator kinerja ini mulai naik dari tahun 2020 ke 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 0,69% dari realisasi tahun sebelumnya. Dengan penurunan tersebut pada intinya upaya pemangkatan dan perbaikan dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Nilai SAKIP Kabupaten akan dikalkulasi oleh Kementerian PAN-RB setelah rakir. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian

Kinerja (PK) adalah 75,14 dan terealisasi 72,23 lebih kecil dari target yang ditetapkan, sehingga capaiannya belum maksimal, yaitu sebesar 96,28 persen dalam kategori kurang/terhambat.

5. Indeks SPBE

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi Indeks SPBE ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan telah mencapai target yang ditetapkan pada tahunan 2,124. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya usaha atau perbaikan dalam upaya meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) adalah 2,124 dan terealisasi 2,31 melebihi target yang ditentukan, sehingga capaiannya mencapai Nilai maksimal, yaitu sebesar 120% (kategori tercapai/sangat berhasil).

6. IKPP Kabupaten

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi IKPP Kabupaten ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 7,9. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya usaha atau perbaikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Pada tahun IKPP dilakukanlah setahun sekali, pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) adalah 7,90 dan terealisasi 8,48 melebihi target yang ditentukan, sehingga capaiannya mencapai 100%, yaitu sebesar 106,86% (kategori tercapai/sangat berhasil).

7. IKPP Desa

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi IKPP Desa ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan telah mencapai target yang ditetapkan pada tahunan 8,5. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya usaha atau perbaikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun IKPP dilakukanlah setahun sekali, pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) adalah 8,50 dan terealisasi 8,67 melebihi target yang ditentukan, sehingga capaiannya mencapai 100%, yaitu sebesar 101,93% (kategori baik/berhasil).

8. Nilai SAKIP Berdo

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi nilai indikator kinerja ini cenderung meningkat dari tahun 2020 ke 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 0,7% dari realisasi tahun sebelumnya. Dengan penurunan tersebut pada adanya upaya pemerintah dan perbaikan dalam mengoptimalkan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) adalah 83,04 dan terealisasi 82,33 lebih rendah dari target

yang dimaksud, sehingga capaian kinerjanya sebesar 33,77% (kategori kurang/berhasil).

c. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Realisasi		
				2023	2024	2025
1.	Terlaksananya pemantauan kelajaban dan mutu pelaksanaan kelajaban di lintang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Jumlah kelajaban lintang Pemerintahan	22 Dokumen	N/A	N/A	21 Dokumen
		Jumlah mutu kelajaban lintang Pemerintahan	6 Dokumen	N/A	N/A	6 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil cacha pelaksanaan kelajaban lintang kesejahteraan rakyat	8 Dokumen	N/A	N/A	8 Dokumen
		Jumlah mutu kelajaban lintang kesejahteraan rakyat	4 Dokumen	N/A	N/A	4 Dokumen
		Persentase produk hukum yang sesuai bentuk hukum	100%	N/A	N/A	100,00%
2.	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMD Sekretariat Daerah pada rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase Penyampaian Laporan BMD secara tertib pada rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	100%	N/A	N/A	100%
		Persentase realisasi Anggaran pada rentang rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	99%	N/A	N/A	99,67%
3.	Terwujudnya ABT yang profesional dan bertanggung jawab pada rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	P ABT pada rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	71 Angka	N/A	N/A	67,67 Angka
4.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan	91 Indeks	90,00 Indeks	90,00 Indeks	90,00 Indeks

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Realisasi		
				2022	2023	2024
	pada Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Badan Litbang Pemasyarakatan dan Narkoba	Persentase Perundang-Undangan				

Dari tabel diatas tersajat realisasi B/A pada tahun 2022 dan 2023 sebagaimana indikator tersebut merupakan indikator baru hasil penyusunan dari Renstra tahun 2020-2024.

b. Program Pembinaan dan Pendampingan

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Realisasi		
				2022	2023	2024
1.	Terlaksananya pemantauan kebijakan dan asesmen pelaksanaan kebijakan di sekretariat Badan Pembinaan dan Pendampingan	Jumlah Kebijakan Bidang Pembinaan	4 Dokumen	N/A	N/A	4 Dokumen
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pembinaan	4 Dokumen	N/A	N/A	4 Dokumen
		Jumlah pengembian laporan program pendampingan	2 Kebijakan	N/A	N/A	2 Kebijakan
		Persentase pemantauan bahan kebijakan penyusunan dan pengembian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa	75%	N/A	N/A	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Pengelolaan Barang/Jasa	Persentase Paraghat Daerah yang melaksanakan pemantauan sistem pengadaan	100%	N/A	N/A	100%

No.	Perjanjian Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Realisasi		
				2022	2023	2024
	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMD Kabupaten Gianyar pada rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyampaian Laporan BMD secara sesuai pada rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	100%	N/A	N/A	100%
		Persentase Realisasi Anggaran pada rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	95%	N/A	N/A	92,13%
	Terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas pada rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	IP ASN pada rentang pada kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	74 Angka	N/A	N/A	77,21 Angka
	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang kendali dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (survey SKM)	1%	N/A	N/A	1%

Dari tabel diatas terlihat realisasi N/A pada tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru hasil penyusunan dari Renstra tahun 2024-2026.

c. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Realisasi		
				2022	2023	2024
1.	Terlaksananya penyusunan kebijakan dan sinergi pelaksanaan kebijakan di ruang lingkup Asisten Administrasi Umum	Jumlah Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Keuangan	3 Dokumen	N/A	N/A	3 Dokumen
		Jumlah Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Perpustakaan, Kearsipan, Perpustakaan, Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian, Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan, dan kewilayahan	17 Dokumen	N/A	N/A	17 Dokumen
2.	Meningkatnya implementasi SAKIP RB di Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi pengukuran capaian Rlm. SAKIP RB Perangkat Daerah	0,61%	N/A	N/A	0,13%
3.	Meningkatnya pengelolaan Barjas dan Proses Organisasi di Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi pengelolaan sistem informasi pemerintah daerah	0,26%	N/A	N/A	N/A
4.	Meningkatnya implementasi SPBE di Kabupaten Jombang	Persentase rekomendasi pengukuran nilai indikator SPBE	1,71%	N/A	N/A	12,25%
5.	Meningkatnya layanan penggunaan layanan lingkup Pemda	Persentase rekomendasi pengukuran IKPP User Layanan	1,48%	N/A	N/A	5,15%
6.	Terlaksananya pembinangunan RB secara optimal	Persentase realisasi rekomendasi Pembinangunan RB Pemda	85%	N/A	N/A	100,15%

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Realisasi		
				2022	2023	2024
7.	Meningkatnya implementasi SAKIP RB di Sekda	Persentase rekomendasi pengadaan capaian Nilai SAKIP RB Kabupaten Cianjur	1,34%	N/A	N/A	0,042%
8.	Meningkatnya capaian kinerja operasional di Kabupaten Cianjur	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Operasional	100%	112,16%	100%	106,7%
9.	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMD Kabupaten Cianjur yang optimal	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	95 Angka	N/A	N/A	100 Angka
		Indeks Pengelolaan Aset Daerah	80 Angka	N/A	N/A	81 Angka
10.	Terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas pada rentang kendali Asisten Administrasi Umum	IP ASN pada rentang kendali Asisten Administrasi Umum	75 Angka	N/A	N/A	77,25 Angka
11.	Meningkatnya layanan penggunaan layanan pada rentang kendalian dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Persentase pelayanan implementasi dan konsultasi kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	N/A	N/A	100%

Dari tabel diatas terlihat realisasi N/A pada tahun 2022 dan 2023 dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru hasil penyesuaian dari Renstra tahun 2020-2024.

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Berikut adalah Capaian Kinerja Kabupaten Cianjur berdasarkan sasaran strategis yang membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah.

Tabel 2. 3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

NO.	Sasaran Strategis (Sasaran Hasil Kerja)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD (Rencana)	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Bersih Inovatif Ignasius publik Pemerintah Daerah	Indeks Reviu Kabupaten	Indeks	85,8	85,22	0,99
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	71	79,22	1,11
		Indeks Akuntabilitas	Indeks	72	79,20	1,10
		Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	78,2	72,21	0,9
		Indeks BPKP	Indeks	3,174	3,91	1,2
		IGPP Kabupaten	Indeks	7,72	8,04	1,04
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Bersih Inovatif Ignasius publik Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Setda	Nilai	80,28	80,22	0,97
		IGPP Setda	Indeks	8,43	8,67	1,03

- Indikator Indeks Reviu Kabupaten (IKK) : Realisasi nilai 85,22 dari target 85,8 menunjukkan bahwa meskipun telah ada komitmen, inovasi kebijakan publik yang dikuliliu belum optimal. Capaian indikator baru mencapai 99% dari target, artinya masih terdapat gap sekitar 12% dari target yang direncana dalam dokumen pemerintah strategis (RPJMD/Renstra). Indikator Indeks Reviu Kabupaten belum mencapai target akhir RPJMD/Renstra dan baru berada di angka kemajuan 99%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya peningkatan, inovasi kebijakan daerah masih perlu dioptimalkan secara sistematis dan terintegrasi, baik dari sisi proses, substansi, maupun partisipasi publik.
- Indikator Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (TKP) : Capaian telah melampaui target sebesar 111%, dengan selisih kelebihan nilai 8,02 poin dari target (79,02 – 71). Indikator Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa menunjukkan capaian sangat positif (111% dari target), yang mencerminkan keberhasilan reformasi birokrasi dalam aspek pengadaan. Pemerintah daerah telah berhasil membangun sistem TKP yang transparan, kompetitif, dan akuntabel.

- Indeks Kelembagaan : Indeks Kelembagaan telah melampaui target (122%), menunjukkan bahwa kelembagaan pemerintah daerah berada dalam keadaan yang baik dan mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Kelembagaan ini dapat dijadikan modal penting dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Capaian indikator telah melebihi target, dengan tingkat kemajuan 108%. Selisih nilai realisasi terhadap target sebesar +4,28 poin, menunjukkan adanya penguatan dalam kelembagaan pemerintahan daerah.
- Nilai SAKIP Kabupaten : Capaian indikator ini berada di bawah target, hanya mencapai 83% dari target dalam RPJMD/Renstra. Nilai 72,53 dari target 76,3 menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal. Deg sebesar 4,17 poin perlu menjadi perhatian, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaporan kinerja. Nilai SAKIP Kabupaten belum mencapai target RPJMD/Renstra. Sampai 83%, menunjukkan masih ada kelemahan dalam penerapan sistem manajemen kinerja berbasis akuntabilitas. Pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan agar keadaan lebih-lebih berorientasi hasil (results-oriented government).
- Indeks SPBE : Capaian indeks melampaui target dengan tingkat kemajuan sebesar 120%. Nilai realisasi 2,91 dari target 2,174 menunjukkan bahwa implementasi SPBE di pemerintah daerah berjalan sangat baik dan progresif. Indeks SPBE telah melampaui target (120%), menunjukkan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah berlangsung sangat baik. Ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam menyajikan pemerintahan yang modern, efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
- IKPP Kabupaten : Capaian indikator telah melebihi target, dengan nilai realisasi 8,45 dari target 7,72. Tingkat kemajuan sebesar 109% menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah telah memenuhi harapan masyarakat secara umum. Indikator IKPP Kabupaten telah melampaui target (109%), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum telah memenuhi harapan melebihi harapan masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi dalam aspek pelayanan telah berhasilkan positif dan harus terus dijaga serta ditingkatkan.
- Nilai SAKIP Kota : Nilai SAKIP Kota mencapai 82,22, melebihi target (80,08) secara nominal meskipun tingkat kemajuan tercatat 97%. Capaian ini menunjukkan kinerja akuntabilitas yang cukup baik, didukung dengan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang efektif.
- IKPP Kota - Indeks realisasi melebihi target sebesar 0%, dengan nilai 8,63 dari target 8,421. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di lingkungan Kota telah sesuai harapan masyarakat. Kinerja ini menjadi penanda

penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, dan bermanfaat pada kepuasan pengguna layanan.

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Target Akhir RPJMD Satuan	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Terkoordinasinya penyusunan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di urusan Pemerintahan dan Kesra	Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan	Dokumen	19 Dokumen	21 Dokumen	1,48
		Jumlah monev kebijakan bidang Pemerintahan	Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	1,33
		Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Dokumen	24 Dokumen	3 Dokumen	1,25
		Jumlah monev kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	1,33
		Persentase produk hukum yang telah tertib administrasi	Persen	100%	100,25%	1,00
2.	Terkoordinasinya pengelolaan keuangan dan BMD Sekretariat Daerah pada instansi bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase Penyampaian Laporan BMD secara akurat pada instansi bidang Pemerintahan dan Kesra	Persen	3,4	100%	3,4
		Persentase Realisasi Anggaran pada instansi bidang Pemerintahan dan Kesra	Persen	3,4	96,83%	3,4
3.	Terwujudnya ASN yang profesional dan bertanggung jawab pada instansi bidang Pemerintahan dan Kesra	IP ASN pada instansi bidang Pemerintahan dan Kesra	Angka	3,4	37,37 Angka	3,4

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
4.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan publik terhadap koordinasi dan mutu hasil kerja Perencanaan dan Karya.	Indeks Kepuasan Layanan Bidang Pelaporan dan Pengawasan Pembangunan Daerah	Indeks	88,7	88,58 Indeks	1,00

Pada kolom target akhir RPJMD/Renstra tertepat realisasi 3/4 dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator tambahan (indikator yang tidak termuat dalam Renstra tahun 2024-2028) untuk mendukung capaian Reformasi Birokrasi lingkup Pemda.

b. Program Perencanaan dan Pembangunan

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Terlaksananya penyusunan rencana pelaksanaan dan monev pelaksanaan rencana di bidang koordinasi Kantor Perencanaan dan Pembangunan	Jumlah Laporan Bidang Perencanaan	Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	0,33
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan	Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	0,33
		Jumlah pengendali keputusan program pembangunan	Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1,00
		Persentase penyusunan bahan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa	Persen	100%	100%	1,00

No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan Konsumen Jasa	Persentase Pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti permohonan sesuai pengaduan	Persen	N/A	100%	N/A
	Terlaksananya pengelolaan sarana dan SDM Kalimantan Timur pada rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyampaian Laporan SDM secara online pada rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persen	N/A	100%	N/A
		Persentase Realisasi Anggaran pada rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persen	N/A	92,15%	N/A
	Terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas pada rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	IP ASN pada rentang pada kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Angka	N/A	87,01 Angka	N/A
	Meningkatnya capaian penggunaan layanan pada rentang kendali dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penyelesaian kualitas pelayanan pengadaan barang jasa (survey LKPI)	Persen	3%	1%	0,33

Pada kolom target akhir RPJMD/Renstra terdapat realisasi N/A dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator usulan/kebaru (indikator yang baru tertuang dalam Renstra tahun 2024-2026) untuk mendukung capaian Kalimantan Timur pada Rentang Kendali.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Sasaran Kerja Renja	Indikator Kinerja Indikatif	Target	Target Akhir RPJMD Sasaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan dan monitor pelaksanaan kebijakan di urusan koordinasi Urusan Administrasi Umum	Jumlah Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Keuangan	Dokumen	N/A	2 Dokumen	N/A
		Jumlah Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Komunikasi dan Informasi, Protokol, Persandian, Perpustakaan, Kearsipan, Perpustakaan, Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian, Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan, dan kesekretariatan	Dokumen	N/A	27 Dokumen	N/A
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP SKPD di Perangkat Daerah	Persentase rata-rata peningkatan capaian Nilai SAKIP SKPD Perangkat Daerah	Persen	0,10%	0,15%	0,26
3.	Meningkatnya penyelidikan Struktur dan Proses Organisasi di Perangkat Daerah	Persentase rata-rata peningkatan nilai kelembagaan perangkat daerah	Persen	0,15%	3 %	N/A
4.	Meningkatnya Implementasi SPBE di Kabupaten Jombang	Persentase rata-rata peningkatan nilai indikator SPBE	Persen	0,102%	12,02%	75,63

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
5.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan lingkup Pemda	Persentase rata-rata penilaian IKPP Unit Layanan	Persen	1,51%	3,134%	2,07
6.	Terlaksananya pemenuhan HR secara optimal	Persentase realisasi rata-rata Rasio Pemenuhan HR Pemda	Persen	N/A	100,12%	N/A
7.	Meningkatnya implementasi SAKIP RB di Reviu	Persentase rata-rata penilaian capaian Nilai SAKIP RB Pemerintah Daerah	Persen	1,14%	0,562%	0,53
8.	Meningkatnya capaian kinerja operasional di Pemerintah Daerah	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Operasional	Persen	100%	124,7%	1,25
9.	Terlaksananya pengelolaan kesangpus dan BMD Pemerintah Daerah yang optimal	Indeks Pengelolaan Kesangpus Reviu	Angka	N/A	100 Angka	N/A
		Indeks Pengelolaan Aset Reviu	Angka	N/A	91 Angka	N/A
10.	Terwujudnya ASN yang profesional sesuai kesangpus pada perang lingkup Sekretariat Administrasi Umum	19 ASN pada perang lingkup Sekretariat Administrasi Umum	Angka	N/A	87,65 Angka	N/A
11.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada perang lingkup kesekretaris dan perang lingkup Sekretariat Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi dan komunikasi kepada internal, eksternal kepada Daerah	Persen	100%	100%	1,00

Pada kolom target akhir RPJMD/Renstra tertapat realisasi N/A dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator individu (indikator yang tidak tercantut dalam Renstra tahun 2024-2026) namun mendukung capaian Sekretariat Kesekretaris lingkup Pemda

5.1.4 Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi

Berikut adalah Capaian Kinerja Sekretariat Daerah berkaitan capaian strategis yang membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional/provinsi.

Tabel 3. 4 Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi

NO.	Sasaran Strategis (Sasaran Hasil Kerja)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Realisasi Nasional/ Provinsi
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokasi Serta kualitas layanan publik Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	58.33	N/A
		Indeks Tata Kelola Pemerintahan Bersih/Juta	Indeks	78.33	N/A
		Indeks Akuntabilitas	Indeks	79.33	N/A
		Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	72.33	64.19
		Indeks SPBE	Indeks	3.91	2.12
		IKPP Kabupaten	Indeks	3.66	N/A
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokasi Serta kualitas layanan publik Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Setda	Nilai	82.33	N/A
		IKPP Setda	Indeks	3.87	N/A

a. **Program Pemantapan dan Keseimbangan Rekpet**

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Realisasi	Realisasi Nasional/Provinsi
1.	Terlaksananya pemantapan kebijakan dan sinkron pelaksanaan kebijakan di tentang	Jumlah kebijakan tentang Pemantapan	31 Dokumen	N/A
		Jumlah sinkron kebijakan tentang Pemantapan	4 Dokumen	N/A

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Realisasi	Realisasi Rasional/Ev aluasi
	Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Jumlah dokumen hasil analisa pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	8 Dokumen	N/A
		Jumlah rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	4 Dokumen	N/A
		Persentase produk hukum yang sesuai konsep hukum	100,28%	N/A
2.	Terlaksanaanya pengelolaan keuangan dan BMD Sekretariat Daerah pada rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase Penyampaian Laporan BMD tepat waktu pada rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	100%	N/A
		Persentase Realisasi Anggaran pada rentang rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	96,87%	N/A
3.	Terwujudnya ASN yang profesional dan bertanggungjawab pada rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	IP ASN pada rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	87,87 Angka	N/A
4.	Terwujudnya laporan pengaduan layanan pada rentang kewenangan dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Laporan Layanan Bantuan Hukum dan Penyuluhan Perundang-Undangan	33,33 Jumlah	N/A

b. Program Pembrosesian dan Pembangunan

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Realisasi	Realisasi Rasional /Evaluasi
1.	Terlaksanaanya penyusunan kebijakan dan rencana pelaksanaan kebijakan di rentang kendali Asisten Pembrosesian dan Pembangunan	Jumlah Kebijakan Bidang Pembrosesian	3 Dokumen	N/A
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pembrosesian	4 Dokumen	N/A
		Jumlah pengarsipan laporan program pembangunan	2 Kebijakan	N/A

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Realisasi	Realisasi Sasaran (Provinsi)
		Persentase penyusunan bahan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengelolaan barang jasa	100%	3,4
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pemantauan secara pengadaan	100%	3,4
	meningkatnya pengelolaan keuangan dan BMD Kabupaten/Kota pada instansi bidang Aset Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyampaian Laporan BMD secara akurat pada instansi bidang Aset Perekonomian dan Pembangunan	100%	3,4
		Persentase Realisasi Anggaran pada instansi bidang Aset Perekonomian dan Pembangunan	96,17%	3,4
	Terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas pada instansi bidang Aset Perekonomian dan Pembangunan	IP ASN pada instansi bidang Aset Perekonomian dan Pembangunan	87,51 Angka	3,4
	Meningkatnya layanan pengadaan layanan pada instansi bidang Aset Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengadaan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (survey ISB)	1%	3,2

c. Program Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kabupaten/kota

No.	Sasaran Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Realisasi	Realisasi Sasaran (Provinsi)
1.	Terlaksananya pemanfaatan kebijakan dan manajemen pelaksanaan kebijakan di	Jumlah Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Keuangan	2 Dokumen	3,0

No.	Pernyataan Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Realisasi	Realisasi (Nasional) / Provinsi
	rumpun kewilayahan Aparatur Administrasi Umum	Jumlah Kelajaran, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewilayahan dan Informasi, Ketentuan, Pemantauan, Pengendalian, Bimbingan, Pengendalian, Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian, Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan, dan kewilayahan	17 Dokumen	N/A
2.	Meningkatnya implementasi SAKIP PB di Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi pemerintah capaian Nilai SAKIP PB Pemerintah Daerah	1,17%	N/A
3.	Meningkatnya pengelolaan Struktur dan Proses Organisasi di Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi pemerintah terkait kelembagaan pemerintah daerah	N/A	N/A
4.	Meningkatnya implementasi SPBE di Kabupaten Jombang	Persentase rekomendasi pemerintah nilai indikator SPBE	12,22%	N/A
5.	Meningkatnya kapasitas pengguna layanan bagian Pemda	Persentase rekomendasi pemerintah SDM User layanan	2,124%	N/A
6.	Terlaksananya pembangunan PB secara optimal	Persentase realisasi cost Rencana Pembangunan PB Pemda	100,13%	N/A
7.	Meningkatnya implementasi SAKIP PB di Desa	Persentase rekomendasi pemerintah capaian Nilai SAKIP PB Pemerintah Daerah	0,02%	N/A
8.	Meningkatnya capaian kinerja operasional di Sekretariat Daerah	Persentase Nilai - Rata Capaian Kinerja Operasional	100,7%	N/A
9.	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMD Sekretariat Daerah yang optimal	Indeks Pengelolaan Keuangan Desa	100 Angka	N/A
		Indeks Pengelolaan Aset Desa	91 Angka	N/A
10.	Terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas pada rumpun kewilayahan Aparatur Administrasi Umum	IP ASN pada rumpun kewilayahan Aparatur Administrasi Umum	87,85 Angka	N/A

No.	Pernyataan Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Realisasi	Realisasi (Nominal) Tertinggi
11.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang kendali dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Persentase pelayanan kepemerintahan dan kemasyarakatan kepada daerah/ wakil kepala daerah	100%	N/A

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi indikator sasaran Sekretariat Daerah dan indikator program Asisten per rentang kendali di lingkup Sekretariat Daerah, dapat disimpulkan bahwa indikator yang dapat diperbandingkan adalah indikator sasaran "Nilai SAKIP Kabupaten" dan "Indeks SPBE". Hal ini terjadi karena sasaran nasional/provinsi, mengalami hal yang sama sehingga dapat diperbandingkan, sedang indikator lain dinyatakan N/A (Not Available) karena pada tingkat nasional/provinsi tidak menghitung indikator tersebut, sehingga tidak bisa diperbandingkan. Berdasarkan hasil perbandingan dengan realisasi tertinggi nasional/provinsi dapat disimpulkan bahwa Nilai SAKIP Kabupaten mendekati realisasi nasional/Provinsi, dan Indeks SPBE telah melebihi realisasi nasional/provinsi.

3.1.8 Analisis atas Realisasi Sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja realisasi perbandingan antara target dan realisasi tahun berjalan, antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan dan tahun terakhir, antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah, dan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu 98,88% menjadi 100,00%, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut antara lain:

1. Koordinasi yang belum optimal terkait evaluasi kebijakan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang mengakibatkan proses pemutakhiran, penilaian, pelaporan, dan evaluasi kebijakan yang dirasakan belum berjalan secara cepat dan terstruktur, sehingga hasil realisasi Indeks Reformasi Kabupaten (IRK) Pemerintah Kabupaten Jombang masih dalam kategori cukup, belum sesuai target yang ditetapkan minimal baik.
2. Adanya perubahan kebijakan dan mekanisme penilaian SAKIP pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang tentunya membutuhkan survey lapangan terkait implementasi SAKIP untuk setiap OPD di Perangkat Daerah, sehingga mempengaruhi adanya penurunan Nilai SAKIP Sekretariat Daerah.

3. BKKP Kabupaten mengalami penurunan karena berdasarkan hasil evaluasi, kinerja internal belum optimalnya monitor, monitoring perbaikan dan pemeliharaan kinerja kabupaten.

Meskipun terjadi penurunan pada beberapa indikator tersebut, tingkat capaian indicator kinerjanya masih mencapai 90% sehingga masuk dalam kategori baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam konteks pengukuran kinerja kinerja, realisasi anggaran digunakan sebagai salah satu indeks untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan efektivitas pengelolaan keuangan terhadap indikator kinerja oleh instansi pemerintah. Capaian realisasi anggaran tergantung kepada manfaat perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi anggaran atau tingkat efisiensi penggunaan Sumber daya terhadap realisasi anggaran yang diusul.

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

5.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Efisiensi Anggaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan dapat menggunakan sumber daya secara efisien. Maksudnya pada penggunaan anggaran yang sekecil mungkin dengan hasil kinerja yang optimal atau sesuai yang telah direncanakan. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

NO	Sasaran Strategis (Sasaran Hasil Kerja)	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Pemerintah Daerah	Indeks Reviu Kinerja	99,21%	92,47%	0,06%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	107,33%	92,47%	1,16%
		Indeks Akuntabilitas	100%	92,47%	1,08%
		Nilai SAKIP Kabupaten	98,89%	92,47%	1,08%
		Indeks SPBE	120%	92,47%	1,30%
		IKPP Kabupaten	108,98%	92,47%	1,18%
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Setda	98,77%	92,47%	1,08%
		IKPP Setda	101,87%	92,47%	1,08%
		Rata-rata Capaian	**102,90%**	**92,47%**	**1,12%**

Pada Tahun 2024 diketahui rata-rata tingkat efisiensi sebesar 1,12% yang dikarenakan perbandingan antara capaian realisasi pagu anggaran dengan rata-rata capaian kinerja. Semakin kecil anggaran yang dipergunakan dan rata-rata capaian lebih tinggi dari pada realisasi, maka semakin tinggi tingkat efisiensi anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerapan tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 sudah efisien.

- Indeks Kualitas Kebijakan : Tingkat efisiensi 93% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan mikro efisien, namun belum sepenuhnya optimal. Artinya, 93% dari anggaran yang telah direalisasikan belum berhasil dikonversi menjadi hasilnya ideal, yang bisa disebabkan oleh: 1. Ketidakefisiensi dalam pelaksanaan kegiatan (misalnya pemborosan yang bisa dengan proses kerja). 2. Kegiatan yang telah langsung berkontribusi pada penyelesaian nilai kebijakan. 3. Pembayaran yang terlalu besar untuk hasil yang relatif kecil.
- Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ZIKP) : Dengan tingkat efisiensi 113%, indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa menunjukkan hasilnya yang sangat efisien dan melebihi ekspektasi. Artinya, dari setiap 100% anggaran yang dipergunakan, berhasil dikonversi menjadi 113% capaian hasilnya menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi.
- Indeks Kelembagaan : Indikator Indeks Kelembagaan menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang sangat baik (106%). Dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran hanya 93,47%, pemerintah daerah telah memberikan kemampuannya dalam mengelola program kelembagaan secara optimal.
- Nilai SAKIP Kabupaten : Nilai SAKIP Kabupaten menunjukkan tingkat efisiensi 109%, dengan capaian kinerja 96,59% dan realisasi anggaran 93,47%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sangat efisien dan menghasilkan kinerja yang tinggi.
- Indeks RRRE : Dengan capaian kinerja 120% dan realisasi anggaran 93,47%, maka tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk Indeks RRRE mencapai 128%, yang menunjukkan indikator efisiensi sangat tinggi. Artinya, dari setiap 100% anggaran yang dipergunakan, dihasilkan 128% capaian kinerja.
- IKPP Kabupaten : Dengan capaian kinerja sebesar 106,98% dan realisasi anggaran 93,47%, maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk IKPP Kabupaten mencapai 114%. Ini berarti setiap 100% anggaran yang dipergunakan berhasil dikonversi menjadi 114% kinerja, menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi. Ini menunjukkan indikator efisiensi yang sangat baik, menunjukkan bahwa anggaran dikelola secara hemat, namun tetap mengoptimalkan pencapaian signifikan dalam layanan publik.
- Nilai SAKIP Desa : Dengan capaian kinerja 96,77% dan realisasi anggaran 93,47%, maka tingkat efisiensi SAKIP Desa mencapai 103%, menunjukkan bahwa keseluruhan SAKIP dikoordinasi dengan efisien, terukur, dan hampir sesuai target tertinggi. Ini menunjukkan bahwa kinerja berhasil dicapai dengan efisiensi tinggi, di mana setiap 100% anggaran yang dipergunakan mampu menghasilkan 103% kinerja secara proporsional.

- BPP Ratu : Dengan capaian kinerja sebesar 101,25% dan realisasi anggaran 93,47%, maka tingkat efisiensi BPP Ratu mencapai 108%. Ini menunjukkan bahwa Ratu berhasil menyelenggarakan pelayanan publik secara efisien dan berkualitas tinggi, serta mampu memfasilitasi keterlibatan dan kepuasan masyarakat melalui penggunaan layanan internal. Artinya, untuk setiap 100% anggaran yang dipergunakan, dihasilkan 108% kinerja, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sangat efisien dan bermanfaat.

2) Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa Beban Kerja pemerintah kabupaten/pegawai sebenarnya sebanyak 222 orang. Dengan dengan 31 Desember 2024 jumlah pemerintah pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sejumlah 226 orang, sehingga pemerintah pemerintah kabupaten/pegawai berlebihan analisis jabatan dan beban kerja adalah sebesar 42,42%. Berdasarkan hasil capaian kinerja Sekretariat Daerah pada Tahun 2024 dengan predikat Sangat Baik dengan jumlah 8261 yang terbentuk, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah sangat efisien, karena realisasi tinggi capaian dengan 8261 yang terbentuk maka dikatakan efisien.

Tabel 3 : 7 Formasi Kekurangan Pegawai (ASN dan Non ASN) Berdasarkan Daerah Tahun 2024

NO	UNIT KERJA/BIDANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI	KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH
		L	P			
1	Sekretariat Daerah	1	-	1	1	0
2	Asisten	3	-	3	3	0
3	Staf Ahli	2	1	3	3	0
4	Bagian Tata Pemerintahan	3	2	15	16	-1
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	1	13	39	-26
6	Bagian Hukum	3	4	9	66	-57
7	Bagian Perekonomian	6	4	11	34	-23
8	Bagian Administrasi Pembangunan	6	4	13	36	-23

NO	UNIT KERJA/BAGIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI	KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH
		L	P			
9	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	18	11	29	85	-56
10	Bagian Umum	67	26	93	159	-66
11	Bagian Organisasi	5	8	13	25	-12
12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	14	7	21	65	-44
13	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	9	9	21	-12
JUMLAH		159	68	226	582	-356

Keterangan : *) Jumlah ASN : 141 Orang

*) Jumlah Non ASN : 85 Orang

Sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan dapat terlaksana dengan efisien dengan penggunaan sumber daya manusia yang ada dan mengoptimalkan kinerja yang berkualitas dan telah sesuai dengan perencanaan. Dalam mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 9 Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia

NO.	Sasaran Strategis (Kawasan Kerja Kerja)	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	% Ketersediaan Pegawai	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Daerah kualitas layanan publik Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	89,97%	42,48%	2,12%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	107,21%	42,48%	2,52%
		Indeks Akuntabilitas	100%	42,48%	2,35%

NO.	Sasaran Strategis (Sasaran Hasil Kerja)	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	% Keberhasilan Pegawai	Tingkat Efisiensi
		Nilai SAKIP Kabupaten	90,89%	42,40%	2,12%
		Indeks BPKP	120%	42,40%	2,12%
		IKPP Kabupaten	136,84%	42,40%	2,12%
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi serta kualitas layanan publik Kawasan Danau	Nilai SAKIP Batu	92,77%	42,40%	2,12%
		IKPP Batu	151,25%	42,40%	2,12%
		Rata-rata Capaian	**100,80%**	**42,40%**	**2,42%**

Berdasarkan tabel tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia dikapitalisasi gambaran umum yang menunjukkan hubungan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) hasil capaian dalam bentuk persentase, keberhasilan pegawai berupa proporsi jumlah pegawai yang berada di bawah keberhasilan kecil (42,40%) dan tingkat efisiensi yang menghasilkan hasil dari perbandingan capaian kinerja terhadap keberhasilan IKU, semakin tinggi nilainya, semakin efisien pemanfaatan IKU yang ada. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia dipersiapkan dan bersinya capaian kinerja dibagi keberhasilan IKU. Rata-rata efisiensi sebesar 2,42 menunjukkan bahwa meskipun pegawai yang berada hanya 42,40% dan keberhasilan capaian kinerja mencapai 100% rata-rata, yang berarti IKU dipersiapkan secara efisien, menghasilkan output yang sangat tinggi dengan input pegawai yang terbatas. Indeks BPKP (Kawasan Pemerintahan Berbasis Elektronik) mencatat efisiensi tertinggi (2,12) menunjukkan digitalisasi sangat mendukung produktivitas tinggi dengan IKU terbatas. Indeks Kualitas Kebijakan (2,12) mencatat efisiensi paling rendah di antara indikator, masih tetap di atas 2 artinya cara ini mampu memaksimalkan pegawai meskipun tahap kebijakan meningkat kompleksitas rendah basis. Dari total dimana tersisapat mencapai positif yaitu dengan hanya 42,40% pegawai, Batu berhasil mencapai kinerja di atas 100% sangat baik rata mencerminkan adaptabilitas dan kompetensi tinggi dari pegawai yang ada. Dalam ini tahal dimana juga menunjukkan bahwa meskipun efisiensi penggunaan IKU sangat tinggi (2,42) masih keberhasilan pegawai hanya 42,40% ini menunjukkan bahwa pegawai bekerja sangat produktif dan efisien. Namun, capaian ini perlu dikalung oleh kebijakan IKU berkelanjutan agar tidak mencerminkan model jangka panjang seperti kelelahan, stagnasi inovasi, atau mencerminkan kualitas layanan publik.

3) Sarana Dan Prasarana

Tabel 2. 9 Data Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH TERMINTA	STATUS KONDISINYA	KELIAN
1	Tanah Bangunan Kantor Bupati Gorontalo	1	1	1
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	1
3	Elevator / Lift	1	1	1
4	Transportasi Compressor	1	1	1
5	Transportasi Generating Set	1	1	1
6	Stationary Generating Set	1	1	1
7	Portable Water Pump	1	1	1
8	Portable Water Pump	1	1	1
9	Submersible Pump	10	10	1
10	Pompa Air	72	72	1
11	Water Purification	1	1	1
12	pompa hidrolis (dll)	1	1	1
13	Boiler	1	1	1
14	Genset	11	11	1
15	Mesin Ketik	37	37	1
16	Bus (Penumpang 30 Orang Kursi)	1	1	1
17	Mini Bus (Penumpang 16 S/D 20 Orang)	1	1	1
18	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Keseluruh)	4	4	1
19	Truck + Attachment	1	1	1
20	Pick Up	4	4	1
21	Sepeda Motor	44	44	1
22	[illegible] lainnya (dll)	1	1	1
23	Sepeda	3	3	1
24	Mesin Genset	1	1	1
25	Air Mineral	6	6	1
26	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 kwt)	6	6	1
27	Mesin Ketik Elektronik/ Sekretaris	2	2	1
28	Lemari Besi / Metal	3	3	1
29	Lemari Kayu	40	40	1
30	Rak Besi	26	26	1
31	Rak Kayu	34	34	1
32	Filing Cabinet Besi	42	42	1

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
33	[illegible]	7	7	0
34	Lemari Kaca	4	4	0
35	Lemari Etalase	1	1	0
36	Alat Penyimpanan Kaset lainnya	3	3	0
37	Papan Tulis/ Papan Nama	1	1	0
38	Meja Kursi	1	1	0
39	Alat Pengkemas Kaset	12	12	0
40	Meja Abonen	7	7	0
41	Alat Penentang Kaset	2	2	0
42	Alat Pemindah Lokal	1	1	0
43	Wakomen Ruangan	2	2	0
44	Papan Nama Instansi	64	64	0
45	Papan Tulis	1	1	0
46	Alat Kaset Lainnya	14	14	0
47	Meja Kerja Kayu	10	10	0
48	Kursi Besi/Metal	7	7	0
49	Kursi Kayu	27	27	0
50	Sofa	1	1	0
51	Meja Rapat	137	137	0
52	Tempat Tidur Besi	4	4	0
53	Tempat Tidur Kayu	21	21	0
54	Meja Tulis	2	2	0
55	Meja Podium	1	1	0
56	Meja Konferensi	4	4	0
57	Meja Tambahan	17	17	0
58	Meja Panjang	28	28	0
59	Meja Bundar	2	2	0
60	Meja L/U Besi	58	58	0
61	Lemari Rolling Besi	10	10	0
62	Sketsel	2	2	0
63	Meja Makan Besi	7	7	0
64	Kursi Rapat	782	782	0
65	Kursi Tamu	52	52	0
66	Kursi Putar	76	76	0
67	Kursi Besar	177	177	0
68	Kursi Lipat	127	127	0
69	Meja Komputer	2	2	0
70	Rak	34	34	0
71	Meubelair lainnya	440	440	0

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
72	Jam Matahari	2	2	0
73	Meja Pengkajian Data/Manual Cleaner	13	13	0
74	Meja Pemotong Rumput	11	11	0
75	Mesin Gas	9	9	0
76	Alat Pembersih lainnya	45	32	13
77	Lemari Es	12	12	0
78	A.C. Sentral	14	14	0
79	A.C. Window	19	19	0
80	A.C. Split	113	113	0
81	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	2	0
82	Sapu Angin	4	4	0
83	Exhaust Fan	18	18	0
84	Alat Pendingin lainnya	9	9	0
85	Komper Gas (Alat Dapur)	14	14	0
86	Rice Cooker (Alat Dapur)	3	3	0
87	Oven Listrik	2	2	0
88	Rice Warmer	2	2	0
89	Kitchen Set	4	4	0
90	Tabung Gas	3	3	0
91	Alat Dapur lainnya	13	13	0
92	Tabelas	82	82	0
93	Loudspeaker	12	12	0
94	Sound System	57	57	0
95	Speaker	6	6	0
96	Microphone	22	22	0
97	Microphone Floor Stand	11	11	0
98	Mic Conference	2	2	0
99	Unit Power Supply	13	13	0
100	Alat Musik	20	20	0
101	Lambang Garuda Pancasila	1	1	0
102	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	1	0
103	Aquarium (Alat Rumah Tangga lainnya / Home Use)	8	8	0
104	Water Filter	3	3	0
105	Tenggo Showroom	3	3	0
106	Kopiator	26	32	6
107	Mesin Faksimile	7	7	0

NO	UNSUR	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
108	[illegible]	2	2	0
109	[illegible]	2	2	0
110	[illegible]	44	44	0
111	[illegible]	3	3	0
112	[illegible]	10	10	0
113	[illegible]	1	1	0
114	[illegible]	4	4	0
115	[illegible]	4	4	0
116	[illegible]	9	9	0
117	[illegible]	44	44	0
118	Meja kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	6	6	0
119	Meja kerja Pejabat Eselon I	8	8	0
120	Meja kerja Pejabat Eselon II	7	7	0
121	Meja kerja Pejabat Eselon IV	9	13	4
122	Meja kerja Pegawai Non Struktural	7	12	5
123	Meja kerja Pejabat fungsional	14	14	0
124	Meja Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	1	0
125	Meja Tamu Sofa	41	41	0
126	Kursi kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	7	7	0
127	Kursi kerja Pejabat Eselon II	6	6	0
128	Kursi kerja Pejabat Eselon III	2	2	0
129	Kursi kerja Pejabat Eselon IV	20	23	3
130	Kursi kerja Pegawai Non Struktural	8	18	10
131	Kursi kerja Pejabat fungsional	47	47	0
132	Kursi tamu/ruang tunggu Pejabat Eselon II	10	12	2
133	Kursi tunggu Depan Meja kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4	4	0
134	Kursi tunggu Depan Meja kerja Pejabat Eselon III	11	11	0
135	Kursi tunggu Depan Meja kerja Pejabat Eselon V	4	4	0
136	Lemari Baja Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	3	0
137	Lemari Baja Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	3	0
138	Buffet Kaca	2	2	0

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
139	Audio Amplifier	4	4	0
140	Audio Mixer Active	1	1	0
141	Microphone Wireless MIC	31	41	10
142	Monitor Speaker	1	1	0
143	Voice Recorder	1	1	0
144	perekaman audio audio lainnya (sel)	45	46	1
145	Camera Handycam	12	12	0
146	Video Mixer	1	1	0
147	Video Switch Panel	1	1	0
148	Tripod Camera	2	2	0
149	Camera Film	2	2	0
150	Lensa Kamera	4	4	0
151	Layar Film/Projector	29	29	0
152	Camera Digital	3	3	0
153	Camera Cinematograf	6	6	0
154	Alat Studio Video Lainnya	2	2	0
155	Telephone (PABX)	22	22	0
156	Handy Talky (HT)	13	13	0
157	Telex	9	9	0
158	Faximile	9	9	0
159	Alat komunikasi telephone lainnya (sel)	2	2	0
160	Alat komunikasi radio sel lainnya (sel)	2	2	0
161	Mesin Kayu	1	1	0
162	alat-alat tenun lainnya (set)	1	1	0
163	peralatan sablon alat lainnya (set)	1	1	0
164	Alat kerajinan anyam lainnya	6	6	0
165	Sepeda	2	2	0
166	Exercise Treadmill	1	1	0
167	Sepeda Statis	1	1	0
168	Alat kesehatan olahraga lainnya	2	2	0
169	Cetak/Elektrotsa	1	1	0
170	Alat Ukur Kesehatan Lainnya	4	4	0
171	Mini Computer	2	2	0
172	PC Workstation	1	1	0
173	PC Unit	92	93	1
174	Lap Top	32	32	0
175	Note Book	28	28	0

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
177	Tablet PC	2	2	0
178	Scanner (Pendukun Min Komputer)	12	12	0
179	Speaker Komputer	1	1	0
180	Pendukun Komlomputer lainnya	1	1	0
181	Monitor	10	10	0
182	Printer (Pendukun Personal Komputer)	116	116	0
183	Scanner (Pendukun Personal Komputer)	1	1	0
184	Pendukun Personal Komputer lainnya	12	12	0
185	Router	1	1	0
186	Modem	2	2	0
187	Perangkat Jaringan Eksternal	112	112	0
188	Pendukun Jaringan lainnya	2	2	0
189	Pendukun Komputer lainnya	1	1	0
190	Tenda	1	1	0
191	Submersible Pump	20	20	12
192	Bangunan Gedung Kantor Permanen	24	18	6
193	Bangunan Gedung Kantor Darurat	7	7	0
194	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	3	3	0
195	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	0
196	Bangunan Gedung Perumahan Permanen	2	2	0
197	Bangunan Gedung Rumah Dinas Permanen	1	1	0
198	Gedung Pos Jaga Permanen	4	4	0
199	Gedung Garasi/ Pool Permanen	8	8	0
200	Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dan)	1	1	0
201	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	1	0
202	Taman Permanen	6	6	0
203	Rumah Negara Golongan I Tipe A Semi Permanen	1	1	0
204	Rumah Negara Golongan I Tipe A Darurat	2	2	0
205	Pagar Permanen	1	1	0

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
200	Jalan Kabupaten Lain-lain	2	2	0
201	Jalan Khusus Lainnya	2	2	0
202	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	1	1	0
203	Bangunan Pengumpul Air Limbah Lainnya	4	4	0
204	Instalasi Air Bersihan / Kota Air Sungai/ Danau	1	1	0
205	Instalasi Pengolah Pasir Manual	1	1	0
206	Jaringan Perpipaan Lain-lain	1	1	0
207	Jaringan Distribusi Lain-lain	14	14	0
208	Waduk Kecil dan sejenisnya	2	2	0
209	Alat Musik Tradisional Daerah	4	4	0
210	Alat Musik Modern/ Band	2	2	0
211	Laboratorium Air	22	22	0
212	Laboratorium Minyak	10	12	2
213	Warung Kopi	7	7	0
214	Lapangan (Sepak, Bola dll)	1	1	0
215	Tanaman Kopi	1	1	0
216	Tanaman Nira	44	44	0
217	Pot Bunga	8	8	0
218	Parkir	64	124	60
219	Gudang dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	1	0
220	Bangunan Bedung Kanan Lain-lain	0	0	0
TOTAL		4.408	4.549	141

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum dengan 31 Desember 2014 jumlah pemenuhan sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana sebanyak 4.408 unit lebih sedikit dari standar kebutuhan secara sebanyak 4.549 unit, sehingga diperoleh persentase ketersediaan sarana prasarana sebesar 96,90%. Berikut adalah perbandingan Tingkat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana:

Tabel 2. 10 Tingkat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana

NO.	Sasaran Strategis (Sasaran Inti Satker)	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Keterwujudan Sarana dan Prasarana	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Biro Kualitas layanan publik Sekretariat Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	99.67%	90.00%	0.92%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	107.81%	90.00%	1.19%
		Indeks Koordinasi	100%	90.00%	1.11%
		Nilai SAKIP Kabupaten	99.00%	90.00%	1.11%
		Indeks SPBE	1.12%	90.00%	1.24%
		LKPP Kabupaten	100.00%	90.00%	1.11%
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Biro Kualitas layanan publik Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Biro	98.77%	90.00%	1.01%
		LKPP Biro	101.00%	90.00%	1.04%
		Rata-rata Capaian	**102.90%**	**90.00%**	**1.09%**

Berdasarkan rasio perwujudan keterwujudan sarana dan prasarana dibandingkan capaian kinerja, rasio tingkat efisiensinya cenderung tinggi. Dengan sarana dan prasarana yang hampir 100% terwujudkan standar keberadaan, organisasi Sekretariat Daerah dapat mencapai 100% hal ini menunjukkan adanya efisiensi. Nilai rata Tingkat efisiensi atas keterwujudan capaian untuk menunjang kinerja organisasi Sekretariat Daerah adalah sebesar 1,09%. Berdasarkan tabel diatas tingkat efisiensi diperoleh dari capaian kinerja dibagi keterwujudan sarana prasarana dikalikan 100 persen. Nilai rata tingkat efisiensi capaian 1,09 artinya setiap 1 unit sarana prasarana menghasilkan 1,09 unit kinerja. SPBE (digitalisasi layanan) menyajikan indikator dengan efisiensi tertinggi capaian 12% dimanfaatkan optimal. Indeks Kualitas Kebijakan memiliki efisiensi di bawah 1 (0,92) menunjukkan proses anggaran, di mana hasil belum sebanding dengan capaian yang tersedia, dan nilai disini juga menunjukkan adanya implikasi positif yaitu dengan keterwujudan capaian 90,00% (hampir ideal), kinerja organisasi mampu 100% menunjukkan bahwa capaian keterwujudan sarana efisien dan produktif. Tingkat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana mencapai rata rata 1,06, yang menunjukkan bahwa sarana sarana fasilitas yang ada dgunakan secara baik dan produktif terutama untuk mendukung layanan digital (SPBE), pengadaan, dan pelaporan kinerja.

2.3 Hambatan atau Permasalahan Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil analisa capaian indikator kinerja, maka dikumpulkan hasilnya sebagai 3 indikator yang belum mencapai 100% pada Dinas RSKIP Kabupaten, Dinas RSKIP Desa, dan Inspektorat Daerahnya Kabupaten. Nilai dari hasilnya tersebut realisasinya masih rendah karena terdapat beberapa kendala yang menyebabkan capaian kinerja belum optimal, antara lain:

1. Kurangnya koordinasi yang berkelanjutan terkait pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pada masing koordinasi pengurus kebijakan.
2. Kurangnya sarana atau prasarana pendukung untuk mengoptimalkan kinerja Inspektorat Daerah;
3. Adanya kesenjangan transfer pengetahuan terkait pentingnya implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada seluruh pegawai lingkup Inspektorat Daerah.

2.4 Upaya Perbaikan Kinerja

Dalam rangka perbaikan kualitas kinerja dan meningkatkan kualitas birokrasi suatu organisasi, pada dasarnya dibutuhkan dan kesiapan pimpinan untuk melakukan berbagai perubahan, berikut adalah beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi secara berkelanjutan atas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan pada masing koordinasi pengurus kebijakan;
2. Melakukan perbandingan perlakuan terbaik (best practices) pada pemerintah daerah lain yang memiliki strategi dan hasil capaian yang lebih baik, sehingga dapat diadopsi di Inspektorat Daerah dan disesuaikan dengan kondisi pemerintah Kabupaten Jembrana;
3. Meningkatkan kompetensi pegawai terkait pentingnya implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada seluruh pegawai lingkup Inspektorat Daerah sehingga terjadi pemerataan pengetahuan pada setiap pegawai.

2.5 Tindak Lanjut Evaluasi RSKIP oleh APIP Tahun 2024

Adapun materi hasil atau rekomendasi hasil evaluasi RSKIP sebagaimanamatri dituangkan melalui Surat Inspektorat Daerah Nomor: 000.6.2.1/1084/412.10/2025 tanggal 4 Maret 2025, antara lain:

1. Melakukanlah upaya koordinasi lingkup Inspektorat Daerah dalam rangka internalisasi kepada seluruh pegawai terkait pentingnya penyelenggara kinerja untuk mengoptimalkan kualitas pemerintahan Inspektorat Daerah;
2. Melakukan penyusunan mekanisme pembaruan penghargaan atas capaian tahun 2025 dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja;
3. Melakukanlah upaya koordinasi internal lingkup Inspektorat Daerah dalam rangka penyusunan sarangan perbaikan, pelaksanaan dan pengawasanya

[illegible] untuk meningkatkan kinerja organisasi yang efektif dan efisien pada seluruh pegawai lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;

4. Mengevaluasi kegiatan tahunan tahun sebelumnya pelaksanaan dan evaluasi SKPD Perangkat Daerah ke SKPDDK melalui Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK);
5. Melaksanakan upaya berdasarkan visi, misi dan tahapan pencapaian target tahun 2024 dan rencana target tahun 2025 berdasarkan hasil survey rutin.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah atas capaian kinerja selama tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi atas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat satu indikator sasaran kinerja yang telah dikomunikasikan dan memenuhi sasaran target, yaitu indikator tingkat kelembagaan.
2. Terdapat dua indikator sasaran kinerja yang telah dikomunikasikan namun belum memenuhi sasaran target, yaitu indikator indeks kualitas kelembagaan, nilai SAKIP kabupaten, dan nilai SAKIP Sekretariat Daerah.
3. Terdapat empat indikator sasaran kinerja yang telah dikomunikasikan dan memenuhi sasaran target yang telah ditentukan, yaitu indikator indeks kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah, indeks SPBE, IKPP kabupaten, dan IKPP Sekretariat Daerah.
4. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah sebesar 102,17% dan capaian realisasi anggaran Sekretariat Daerah sebesar 92,47% yang termanfaatkan secara optimal (efisien).

4.2 Rekomendasi

Dalam rangka mendorong capaian kinerja yang belum memenuhi target dan mempertahankan capaian kinerja yang telah melebihi target, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dapat dilakukan oleh Sekretariat Daerah pada tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan analisis penyebab dari tiap-tiap indikator Sasaran, Program, dan capaian tahun berikutnya.
2. Mengadakan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan bimtek atau pelatihan di bidang dimensi/fokus kinerja.
3. Mengadakan koordinasi dan kerja sama pada internal Bagian-Bagian Sekretariat Daerah.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 dikemukakan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam Sekretariat Kerja Sekretariat Daerah, sehingga pelaksanaan tugas-tugas tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Jombang, 18 Februari 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Jombang

SETDA

[illegible] M.Si., M.Ak
Pembina Utama Madya
NIP. 197207120008021318

DAFTAR LAMPIRAN

1. PK dan PK Perubahan Bekala 2024
2. IKP 2024
3. RENAKIN 2024
4. MONEV RENAKIN 2024 TW IV
5. EVRIA 2024 TW IV
6. LKI 2024
7. Data Hasrom Sesia Per Desember 2024
8. Data ASN Sesia Per Desember 2024
9. Data Kebutuhan Pegawai 2024
10. Data Aset Sekretariat Daerah Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 100/0/2415.01/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS PURNOMO, SH., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUGIAT, S.Sos., M.Pol.T.
Jabatan : PJ. BUPATI JOMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 18 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah
Ditandatangani secara elektronik

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP. 197207121998021013

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik

SUGIAT, S.Sos., M.Pol.T.

KODE UNIT: 4E1.13.3.4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Sekretariat Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	69	Rp.84.893.728.980
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	72,5	
		Indeks Akuntabilitas	78,25	
		Nilai SAKIP Kabupaten	73,34	
		Indeks SPBE	3,154	
		IKPP Kabupaten	7,3	
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekda	83,54	
		IKM Sekda	3,9	

Jombang, 08 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP. 197207161998021010

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik

SUGIAT, S.Sos., M.Pd.T.

KODE UNIT: 4011234

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 008.6.5.3/0/415.01/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS PURNOMO, SH., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM
Jabatan : Pj. BUPATI JOMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebaiknya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut merupakan tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 13 September 2024
PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah
Ditandatangani secara elektronik

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP 197207101998031010

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

KODE UNIT 415.1.3.4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	81	Rp.84.921.051.445
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	73,2	
		Indeks Kelembagaan	75,23	
		Nilai SAKIP Kabupaten	73,14	
		Indeks SPBE	2,124	
		IKPP Kabupaten	7,3	
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Kewilayahan Daerah	Nilai SAKIP Camat	83,24	
		IKPP Kecam	3,8	

Jombang, 19 September 2024
PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah
Ditandatangani secara elektronik

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP 197207101995031010

PIHAK KEDUA
Rj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik

DR. DR. TEGUH NARUTOMO, MM

KODE UNIT 4.01.12.3.4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

[illegible]

PERSETUJUAN HASIL KERJA KOMPETENSI

DAFTAR PEMAKAI TERPERINCI TERKAIT DAN PERSYARAT UNIT KERJA MANDIRI

[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	No.	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]

[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. [illegible]				
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
B. [illegible]				
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN [illegible] — **PERIODE PENILAIAN 01 SEPTEMBER [illegible] – [illegible]**

No	[illegible]	No	[illegible]	
1	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]

[illegible]

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A. [illegible]					
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
B. [illegible]					

[illegible]

1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]

2	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	
3	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RANCANGAN KINERJA PEGAWAI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DAN PENYEDIA UNIT KERJA BANDUNG

PERIODE PERJANJIAN KINERJA 01 SEPTEMBER S/D 31 DESEMBER 2020

NO	PIHAK PERTAMA	NO	PIHAK KEDUA
1	[illegible]	1	[illegible]
2	[illegible]	2	[illegible]
3	[illegible]	3	[illegible]
4	[illegible]	4	[illegible]
5	[illegible]	5	[illegible]

NO	SASARAN KINERJA PERSPEKTIF TUPOKSI	SASARAN KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. UTAMA					
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
B. TAMBAHAN					

[illegible]		
1	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	
2	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	
3	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	
4	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	
5	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	
6	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	
7	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	

[illegible], [illegible] 2017
[illegible]

Pegawai Yang Dinilai

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

LAMPIRAN SURAT TUGAS PENGAWAS
PEMERIKSAAN DINAS KESEHATAN
DINAS PELAYANAN PERTAMA TERHADAP PERTAMA (SPT KESEHATAN MANUSIA)

DAFTAR SUMBER DATA / DOKUMEN			**DAFTAR PERMINTAAN DATA / DOKUMEN**		
NO	**NAMA DATA / DOKUMEN**		**NO**	**NAMA DATA / DOKUMEN**	
1	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]

RUANG LINGKUP

NO	**SUMBER DATA / DOKUMEN / PERTANYAAN / PERMINTAAN**	**DESKRIPSI DATA / DATA**	**LAMPIRAN**	**PENANGGUNG JAWAB / DATA**	**TARGET**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. [illegible]					
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
B. [illegible]					

[illegible]

1 [illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
2 [illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
3 [illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
4 [illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	

1	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	
2	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	
3	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	

[illegible], 1 Agustus 2021

Agustus Tang Sada

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

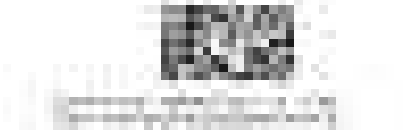

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

LAPORAN KEBUTUHAN PEGAWAI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBANG

No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Satuan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
1	1-000 001	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIS DAERAH	STRUK TURAL	14	1 Orang	1 Orang	0 Orang
2	1-000 002	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIS DAERAH	STRUK TURAL	14	1 Orang	1 Orang	0 Orang
3	1-000 003	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIS DAERAH	STRUK TURAL	14	1 Orang	1 Orang	0 Orang
4	1-000 002	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	STRUK TURAL	13	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
5	1-000 021	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	STRUK TURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
6	1-000 021	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	STRUK TURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
7	1-000 007	Analis Kesiapan Ahli Muda	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSI ONAL	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
8	1-000 008	Analis Kesiapan Ahli Pertama	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSI ONAL	8	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
9	1-000 009	Analis Hukum Ahli Muda	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSI ONAL	9	1 Orang	5 Orang	-4 Orang
10	1-000 010	Analis Hukum Ahli Pertama	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSI ONAL	8	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
11	1-000 011	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSI ONAL	9	0 Orang	6 Orang	-6 Orang
12	1-000 012	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSI ONAL	8	1 Orang	5 Orang	-4 Orang
13	1-000 013	Penyusun Hukum Ahli Muda	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSI ONAL	9	0 Orang	4 Orang	-4 Orang
14	1-000 014	Penyusun Hukum Ahli Pertama	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSI ONAL	8	0 Orang	6 Orang	-6 Orang

15	1-000 015	Pemasah Teknis Kadaster	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	7	1 Orang	3 Orang	-4 Orang
16	1-000 016	Pemuan Materi Hukum dan Pertimbang-Hukum	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	7	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
17	1-000 017	Pendata Layanan Operasional	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	7	0 Orang	4 Orang	-4 Orang
18	1-000 018	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	9	0 Orang	4 Orang	-4 Orang
19	1-000 019	Dokumentasi Hukum	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	9	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
20	1-000 020	Pengadministrasi Pemerintah	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	9	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
21	1-000 021	Analis Kebijakan Ahli Muda	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	FUNGSIONAL	9	1 Orang	3 Orang	-2 Orang
22	1-000 021	Analis Kebijakan Ahli Pertama	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	FUNGSIONAL	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
23	1-000 024	Pendata Kasus Pemerintahan	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	7	1 Orang	3 Orang	-2 Orang
24	1-000 025	Pemasah Teknis Kadaster	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	7	2 Orang	3 Orang	-1 Orang
25	1-000 026	Pendata Layanan Operasional	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	7	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
26	1-000 027	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	9	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
27	1-000 028	Pengadministrasi Pemerintah	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	9	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
28	1-000 030	Analis Kebijakan Ahli Muda	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	FUNGSIONAL	9	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
29	1-000 031	Analis Kebijakan Ahli Pertama	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	FUNGSIONAL	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
30	1-000 032	Pengolah Layanan Operasional	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA	9	0 Orang	8 Orang	-8 Orang
31	1-000 033	Pemasah Teknis Kadaster	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA	7	0 Orang	10 Orang	-10 Orang
32	1-000 034	Pendata Layanan Operasional	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA	7	0 Orang	3 Orang	-3 Orang

33	1.03.02.2.01	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA	8	0 Orang	-8 Orang	-8 Orang
34	1.03.02.2.02	Pengadministrasi Kesejahteraan	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA	8	0 Orang	8 Orang	-8 Orang
35	1.03.02.2.03	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	STRUKTURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
36	1.03.02.3.01	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Mahir	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	FUNGSIONAL	18	0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
37	1.03.02.3.02	KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	STRUKTURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
38	1.03.02.3.03	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	STRUKTURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
39	1.03.02.3.04	Pengelola PBJ Ahli Madya	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	FUNGSIONAL	12	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
40	1.03.02.3.05	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	FUNGSIONAL	9	0 Orang	7 Orang	-7 Orang
41	1.03.02.3.06	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	FUNGSIONAL	6	0 Orang	23 Orang	-23 Orang
42	1.03.02.3.07	Pranata Komputer Muda	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	FUNGSIONAL	6	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
43	1.03.02.3.08	Pranata Komputer Pertama	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	FUNGSIONAL	6	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
44	1.03.02.3.09	Perekam Teknik Kadastral	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	0 Orang	7 Orang	-7 Orang
45	1.03.02.3.10	Pengolah Hasil Sensor dan Telemetri Informasi	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
46	1.03.02.3.11	Pengelola Layanan Operasional	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	0 Orang	4 Orang	-4 Orang
47	1.03.02.3.12	Pengelola Layanan Pengadaan	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	0 Orang	5 Orang	-5 Orang
48	1.03.02.3.13	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	0 Orang	5 Orang	-5 Orang

49	1-000 [illegible]	Pengadministrasi Perkantoran	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	3	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
50	1-000 [illegible]	Penata Layanan Operasional	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
51	1-000 [illegible]	Operator Layanan Operasional	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	5	3 Orang	3 Orang	2 Orang
52	1-000 [illegible]	Analis Kebijakan Ahli Muda	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	FUNGSIONAL	8	3 Orang	4 Orang	-1 Orang
53	1-000 [illegible]	Analis Kebijakan Ahli Pertama	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	FUNGSIONAL	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
54	1-000 [illegible]	Penelaah Teknis Kebijakan	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKSANA	7	1 Orang	5 Orang	-4 Orang
55	1-000 [illegible]	Penata Layanan Operasional	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKSANA	7	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
56	1-000 [illegible]	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKSANA	9	0 Orang	11 Orang	-11 Orang
57	1-000 [illegible]	Pengadministrasi Perkantoran	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKSANA	3	3 Orang	5 Orang	-2 Orang
58	1-000 [illegible]	Analis Kebijakan Ahli Muda	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	FUNGSIONAL	8	0 Orang	4 Orang	-4 Orang
59	1-000 [illegible]	Analis Kebijakan Ahli Pertama	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	FUNGSIONAL	6	0 Orang	4 Orang	-4 Orang
60	1-000 [illegible]	Penelaah Teknis Kebijakan	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	7	0 Orang	34 Orang	-34 Orang
61	1-000 [illegible]	Penata Layanan Operasional	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
62	1-000 [illegible]	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	9	0 Orang	8 Orang	-8 Orang
63	1-000 [illegible]	Pengadministrasi Perkantoran	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	3	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
64	1-000 [illegible]	Operator Layanan Operasional	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
65	1-000 [illegible]	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	STRUKTURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
66	1-000 [illegible]	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	STRUKTURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang

07	1-000 007	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	STRUKTURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
08	1-000 110	KEPALA BAGIAN UMUM	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	STRUKTURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
09	1-000 070	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	FUNGSIONAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
10	1-000 071	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	FUNGSIONAL	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
11	1-000 072	Perencana Ahli Muda	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	FUNGSIONAL	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
12	1-000 073	Perencana Ahli Pertama	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	FUNGSIONAL	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
13	1-000 074	Analis Kepegawai Ahli Muda	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	FUNGSIONAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
14	1-000 075	Analis Kepegawai Ahli Pertama	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	FUNGSIONAL	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
15	1-000 076	Pengadah Teknis Kepegawai	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	7	2 Orang	5 Orang	-3 Orang
16	1-000 077	Penata Layanan Operasional	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	7	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
17	1-000 078	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	9	4 Orang	4 Orang	0 Orang
18	1-000 079	Pengadministrasi Perkantoran	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	5	0 Orang	4 Orang	-4 Orang
19	1-000 081	Analis Kepegawai Ahli Muda	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	FUNGSIONAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
20	1-000 082	Analis Kepegawai Ahli Pertama	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	FUNGSIONAL	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
21	1-000 083	Pengadah Teknis Kepegawai	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKSANA	7	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
22	1-000 084	Penata Layanan Operasional	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKSANA	7	0 Orang	2 Orang	0 Orang
23	1-000 085	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKSANA	9	3 Orang	7 Orang	-4 Orang
24	1-000 086	Pengadministrasi Perkantoran	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKSANA	5	0 Orang	3 Orang	-3 Orang

05	1-000 [illegible]	KEPALA SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	STRUK TURAL	9	1 Orang	3 Orang	2 Orang
06	1-000 [illegible]	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	2 Orang
07	1-000 [illegible]	Analis Kebijakan Ahli Muda	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	FUNGSI ONAL	10	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
08	1-000 [illegible]	Analis Kebijakan Ahli Pertama	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	FUNGSI ONAL	8	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
09	1-000 [illegible]	Penerjemah Ahli Muda	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	FUNGSI ONAL	8	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
10	1-000 [illegible]	Penerjemah Ahli Pertama	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	FUNGSI ONAL	8	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
11	1-000 [illegible]	Pengadm Teknis Kebijakan	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PELAKS ANA	7	2 Orang	5 Orang	-3 Orang
12	1-000 [illegible]	Pengadm Layanan Operasional	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PELAKS ANA	7	0 Orang	4 Orang	-4 Orang
13	1-000 [illegible]	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PELAKS ANA	6	2 Orang	3 Orang	-1 Orang
14	1-000 [illegible]	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	KEPALA SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	FUNGSI ONAL	8	2 Orang	3 Orang	-1 Orang
15	1-000 [illegible]	Pengadm Teknis Kebijakan	KEPALA SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PELAKS ANA	7	0 Orang	4 Orang	-4 Orang
16	1-000 [illegible]	Pengadm Layanan Operasional	KEPALA SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PELAKS ANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
17	1-000 [illegible]	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PELAKS ANA	6	0 Orang	3 Orang	-3 Orang

108	1-000 [illegible]	Pengadministrasi Perkantoran	KEPALA SUB BAGIAN KEBUTUHAN PIMPINAN	PELAKSANA	3	1 Orang	3 Orang	-2 Orang
109	1-000 [illegible]	Pemasah Tenis Rekreasi	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	PELAKSANA	7	0 Orang	4 Orang	-4 Orang
110	1-000 [illegible]	Pemasa Aquarium	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	PELAKSANA	7	0 Orang	8 Orang	-8 Orang
111	1-000 [illegible]	Pemasa Layanan Operasional	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	PELAKSANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
112	1-000 [illegible]	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	PELAKSANA	9	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
113	1-000 [illegible]	Pengolah Layanan Operasional	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	PELAKSANA	9	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
114	1-000 [illegible]	Pengolah Aquarium	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	PELAKSANA	9	1 Orang	3 Orang	-2 Orang
115	1-000 [illegible]	Pengolah Sistem	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	PELAKSANA	9	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
116	1-000 [illegible]	Pengadministrasi Perkantoran	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	PELAKSANA	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
117	1-000 111	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, PIMPINAN, STAF AHLI DAN KERAGAMAN	KEPALA BAGIAN UMUM	STRUKTURAL	9	1 Orang	3 Orang	0 Orang
118	1-000 [illegible]	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	KEPALA BAGIAN UMUM	STRUKTURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
119	1-000 [illegible]	KEPALA SUB BAGIAN KERUMAHTANGGA	KEPALA BAGIAN UMUM	STRUKTURAL	9	1 Orang	3 Orang	0 Orang
110	1-000 [illegible]	Pemasah Tenis Rekreasi	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, PIMPINAN, STAF AHLI DAN KERAGAMAN	PELAKSANA	7	0 Orang	10 Orang	-10 Orang
111	1-000 [illegible]	Pemasa Layanan Operasional	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, PIMPINAN, STAF AHLI DAN KERAGAMAN	PELAKSANA	7	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
112	1-000 114	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, PIMPINAN, STAF AHLI DAN KERAGAMAN	PELAKSANA	9	0 Orang	25 Orang	-25 Orang
113	1-000 [illegible]	Pengadministrasi Perkantoran	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, PIMPINAN, STAF AHLI DAN KERAGAMAN	PELAKSANA	9	0 Orang	20 Orang	-20 Orang

114	1-000 109	Analisis Tenaga	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, PEMINAMAN STAF HAJI DAN KEPEGAWAIAN	FUNGSIONAL	9	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
115	1-000 110	Pemula Komputer Terampil	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, PEMINAMAN STAF HAJI DAN KEPEGAWAIAN	FUNGSIONAL	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
116	1-000 111	Pemasam Teknis Kelistrikan	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
117	1-000 120	Pemula Layanan Operasional	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	PELAKSANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
118	1-000 121	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	PELAKSANA	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
119	1-000 122	Pengolah Kepegawaian	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	PELAKSANA	9	0 Orang	6 Orang	-6 Orang
120	1-000 123	Pengolah Layanan Operasional	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	PELAKSANA	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
121	1-000 124	Pengolah Administrasi Perkantoran	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	PELAKSANA	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
122	1-000 127	Operator Layanan Operasional	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	PELAKSANA	9	0 Orang	7 Orang	-7 Orang
123	1-000 128	Pemula Komputer Perencana	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	FUNGSIONAL	9	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
124	1-000 129	Pemasam Teknis Kelistrikan	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	PELAKSANA	7	0 Orang	6 Orang	-6 Orang
125	1-000 130	Pemula Layanan Operasional	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	PELAKSANA	7	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
126	1-000 131	Pengolah Data dan Informasi	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	PELAKSANA	9	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
127	1-000 132	Pengolah Layanan Pengadaan	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	PELAKSANA	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
128	1-000 133	Pengolah Layanan Operasional	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	PELAKSANA	9	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
129	1-000 134	Pengolah Administrasi Perkantoran	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	PELAKSANA	9	0 Orang	3 Orang	-3 Orang

130	1-[illegible] [illegible]	Operator Layanan Operasional	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	PELAKSANA	3	0 Orang	-3 Orang	-3 Orang
131	1-[illegible] [illegible]	Operator Layanan Operasional	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	PELAKSANA	3	0 Orang	-41 Orang	-41 Orang
132	1-[illegible] [illegible]	Operator Layanan Operasional	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	PELAKSANA	1	0 Orang	-16 Orang	-16 Orang
133	1-[illegible] [illegible]	SEKRETARIS DAERAH		STRUK TURAL	15	1 Orang	3 Orang	2 Orang
134	1-[illegible] [illegible]	STAF AHLI Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan		STRUK TURAL	15	1 Orang	3 Orang	2 Orang
135	1-[illegible] [illegible]	STAF AHLI Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Politik		STRUK TURAL	15	1 Orang	3 Orang	2 Orang
136	1-[illegible] [illegible]	STAF AHLI Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan		STRUK TURAL	15	1 Orang	3 Orang	2 Orang
Jumlah					54	332	-481	

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

| | | |

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]